

**KOLABORASI PENTHA HELIX PADA PEMULIHAN PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN
LUWU UTARA**



THESIS
Oleh :
Fera Juliana Fajar (105031103920)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

***Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir
Bandang Di Kabupaten Luwu Utara***

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

Fera Juliana Fajar
Nomor Induk Mahasiswa : 105031103920

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca
Bencana Banjir Bandang di Luwu Utara
Nama : Fera Juliana Fajar
NIM : 105031103920
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia penguji Tesis pada Tanggal 23 Agustus 2023 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 23 Agustus 2023

Tim Penguji :

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Ketua Penguji

Dr.Hj.Fatmawati, M.Si

Penguji/Pembimbing I

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

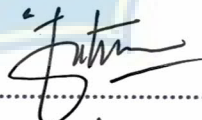
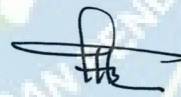
Penguji/Pembimbing II

Prof. Dr. Nuryanti Mustari,S.Ip., M.Si

Penguji

Dr. Abdi, M,Pd

Penguji



TESIS
Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir
Bandang Di Kabupaten Luwu Utara

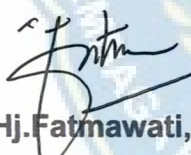
Yang diajukan dan disusun oleh

Fera Juliana Fajar
NIM : 105031103920

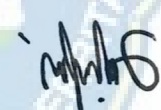
Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 23 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komite Pembimbing

Pembimbing I


Dr.Hj.Fatmawati, M.Si

Pembimbing II


Dr.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana




Prof.Dr.H.Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613.949

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik


Dr.Hj.Fatmawati, M.Si
NBM. 107.6424

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fera Juliana Fajar

NIM : 105031103920

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagai atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2023

yang menyatakan

Fera Juliana Fajar

105031103920

ABSTRAK

Fera Juliana Fajar. Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara (dibimbing oleh Fatmawati dan Ihyani Malik).

Pemerintah Luwu Utara merupakan sebuah komponen yang sangat ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan daerah khususnya dalam membantu masyarakat pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. penelitian ini memfokuskan pada kolaborasi peran aktor pentha helix yakni 1)*Collaborative Culture* 2)*Collaborative Leadership* 3)*Strategic Vision* 4)*Collaborative Team Process*.5)*Collaborative Structure*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kolaborasi aktor pentha helix pada pemulihan pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi pemerintahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi kultural, aktor pentha helix memiliki perannya masing-masing pada percepatan pemulihan pasca bencana banjir, pemerintah sebagai center aktor mendukung penuh nilai-nilai kultural masyarakat, collaborative leadership semua aktor pentha helix menggunakan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan terkordinasi, *strategic vision* visi dan strategi aktor pentha helix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang memiliki kualitas yang baik dan fleksibilitas, *Collaborative team process* aktor pentha helix mampu berkolaborasi antar pemerintah dan non birokrasi pada pemulihan pasca bencana, dan Collaborative structur ini melakukan pembenahan dan penguatan mitigasi pada pemulihan bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara

Keyword: Collaborative Culture, Collaborative Leadership, Strategic Vision, Collaborative Team Process, Collaborative Structure. Pentha Helix

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara”**. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini dan paling berjasa dalam penyusunan tesis ini adalah Ibu Dr.Hj.Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang begitu sangat padat untuk membimbing penulis.

Proses penulisan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan, olehnya itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat.

1. **Bagi Ibu dan Bapakku** yang ku kasihi penuh kemuliaan dengan seluruh energi cinta yang berumah pada diriku, Fajar, SE dan Dra. Erna Keduanya memiliki karakter yang sangat bernyawa dan berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Terima kasih sudah bahu membantu mengajariku membaca ketika kecil, mengasah kepekaanku, memperkenalkanku cerita-cerita seru para Nabi,

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga kesehatan dan kemuliaan terlimpah baginya.
3. Bapak Prof. Dr. Irwan Akib, M. Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Fatmawati. M.Si Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada seluruh jajaran dosen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, selama menjadi Mahasiswa Terkhusus di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada semua Kakak dan Adikku, terima kasih atas semua dedikasi yang kalian bantukan untuk saudara ku.
7. Kepada saudara-saudari seperkuliahan di Program Studi Magister Administrasi Publik, terkhusus teman-teman kelas Angkatan 2020. Juga kepada kakanda senior di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang banyak membantu penulis selama bermahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada semua teman-teman kantor Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Luwu Utara

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membagaun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbagan yang berarti bagi pihak yang bersangkutan.

Makassar, 1 Agustus 2023

Fera Juliana Fajar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori Kolaborasi.....	11
C. Konsep Bencana.....	25
D. Pentha Helix.....	29
E. Manajemen Bencana.....	32
F. Kerangka Pikir.....	40
G. Fokus Penelitian.....	42
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengabsahan Data.....	49

G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
B. Kolaborasi Pentahelix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara.....	67
C. Pembahasan.....	98
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara kepulauan di Asia Tenggara memiliki 13.487 pulau besar dan pulau kecil, diantaranya tidak berpenghuni dan tersebar sekitaran daerah khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis merupakan daerah dengan tingkat bencana alam yang cukup tinggi, dan di beberapa negara bencana alam sangat lumrah terjadi, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, banjir dan tsunami, letusan gunung, tanah longsor, angin puting beliung (Cahyono et al., 2019). Selain mengancam jiwa manusia tentu juga merusak infrastruktur negara khususnya daerah yang terkena dampak dari bencana alam, bencana alam merupakan sebuah pergolakan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun itu sebagai manusia tentu kita harus melakukan tindakan untuk meminimalisir dampak yang akan diberikan kepada lingkungan sekitar baik kepada alam maupun manusia.

Dampak bencana alam tentu akan merusak sistem yang telah dibuat oleh manusia, ancaman pada jiwa manusia, perekonomian yang terhenti, rusaknya semua fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat serta sistem pemerintahan yang lumpuh. Oleh sebab itu isu dan gerakan global dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. (Arief, 2019:106) karena ketidakberdayaan manusia serta

dampak bencana menyebabkan kerugian yang dialami dalam bidang keuangan dan struktural tidak bisa dihindari. Menurut Wikipedia Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, yang mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan (Putra, 2019)

Dengan adanya kolaborasi yakni sebagai konsep pemecahan konflik yang melibatkan *stakeholder* maupun aktor yang berkepentingan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kolaborasi ini merupakan sebuah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan untuk pemulihan pasca bencana, kolaborasi yang dianggap mampu menangani dampak dari bencana alam yang terjadi di Luwu Utara, yakni bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020.

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat sering dilanda bencana alam, kabupaten/kota kini mulai mengembangkan kebijakan kebencanaan di tingkat nasional. Dengan upaya penanggulangan kebencanaan dengan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di daerah bertujuan untuk menangani pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi alam sekitar daerah. Pemulihan pasca bencana banjir bandang

melibatkan semua pihak agar dampak yang ada setelah adanya bencana tersebut bisa berkurang baik itu secara fisik dan psikologis pada korban dampak banjir bandang merupakan sebuah upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana alam terhadap manusia dan alam sekitar (Cahyono et al., 2019). Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (*structural approach*), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah bencana alam. Selama ini penanggulangan bencana alam, lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik untuk mengurangi dampak bencana (Yuningsih & Kurniawan, 2019).

Kabupaten Luwu utara salah satu dari sekian daerah yang ada di Indonesia yang sudah terkena bencana alam yang cukup besar dan memakan korban jiwa yang terbilang cukup banyak. Keadaan geografis luwu utara yang bervariasi terdiri dataran rendah dan dataran tinggi, serta memiliki 8 sungai besar dengan curah hujan yang tinggi. Sehingga sangat rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir bandang yang dipicu oleh kondisi alam yakni curah hujan yang sangat tinggi dan pertumbuhan awan cumulonimbus (Syaifullah, 2020). Selain dipicu oleh kondisi alam tentu faktor campur tangan manusia juga menjadi salah satu penyebab dari terjadinya banjir bandang di Kota Masamba berdasarkan CNBC (*Consumer News and Business Channel*) Indonesia BNPB memonitor sebanyak 4.930 keluarga yang terdampak

pada enam kecamatan yakni kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat. Serta ribuan rumah terdampak banjir yang tergolong atas dua kategori yakni rusak berat dan rusak ringan. (<https://www.cnbcindonesia.com/news>)

Berdasarkan data-data mengenai bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, penulis menggunakan tahapan manajemen kebencanaan yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai upaya baik itu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat serta berkaitan dengan pemulihan dengan bencana pada tahapan sebelum maupun setelah kejadian bencana alam.

Melalui teori kolaborasi Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara (Noorsyamsa, 2008) bahwa dengan menggunakan lima komponen pada kolaborasi yakni 1) *Collaborative Culture* 2) *Collaborative Leadership* 3) *Strategic Vision* 4) *Collaborative Team Process* 5) *Collaborative Structure*. Dengan penggunaan model pentahelix mencakup lima aktor yang melakukan kerjasama 1) *Akademik* 2) *Bisnis* 3) *Community* 4) *Government* 5) *Media* diharapkan manajemen bencana di Luwu Utara dengan melibatkan seluruh aktor pentahelix dengan melalui peran serta kordinasi pada model pentahelix mampu mempercepat pemulihan Kabupaten Luwu Utara pada proses manajemen bencana. Dengan berbasis model pentahelix yang dirujuk oleh penulis sebagai indikator dalam mengukur

kolaborasi penthahelix pada percepatan pemulihan banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kolaborasi aktor pentha Helix pada Pemulihan bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana kordinasi aktor pentha Helix pada pemulihan bencana banjir bandang di Kabupateen Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kolaborasi aktor pentha helix pada pemulihan bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui kordinasi aktor pentha helix pada manajemen bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Di harapkan dapat memberikan tambahan dan kontribusi wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai penerapan teori-teori yang telah diterima pada bangku perkuliahan khususnya dibidang ilmu administrasi publik, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman yang positif dan dapat memperkaya konsep atau teori untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan ke pemulihan bencana.

2. Kegunaan praktis

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan ilmu pengetahuan, dan bagi pemerintah, di harapkan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan pemulihan kebencanaan yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan peneliti yakni sebagai berikut :

NO	Nama Judul dan Sumber	Metode Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asmiddin , Anwar Sadat , dan Muh Askal Basir. Kolaborasi triple helix dalam penanggulan gan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton (2019)	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	a.Kordinasi penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton b. hambatan penanggulangan bencana di Kabupaten Buton	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya tingkat koordinasi dan inovasi yang terjalin pada elemen triple helix sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat upaya mitigasi terkesan lamban; antar elemen triple helix ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen helix, sehingga relasi triple helix tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan; dan kondisi prosedur birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di Kabupaten Buton.

2.	Putri Rizkiyah, Liyushiana, dan Herman. Sinergitas pentha helix dalam pemulihan pariwisata pasca bencana erupsi gunung api sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (2019)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Peran pentahelix dalam sinergi dan program pemulihan pasca erupsi sinabung di Kabupaten Karo	sinergitas pentahelix dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Karo merupakan strategi yang jitu sebagai program rehabilitasi pascabencana erupsi gunungapi Sinabung. Beberapa program yang diusulkan tidak akan optimal jika salah satu pihak tidak berperan maksimal Oleh sebab itu, kolaborasi mutlak dibutuhkan dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Karo. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada inventarisasi pemulihan pariwisata secara umum di Kabupaten Karo. Penelitian ini belum menyentuh langsung penduduk yang paling merasakan dampak erupsi gunungapi Sinabung, yaitu para pengungsi dari 4 kecamatan. Sebaiknya penelitian berikutnya mengeksplorasi potensi wisata yang dapat diciptakan dari lokasi pengungsian dengan menggunakan pendekatan desa binaan wisata.
----	--	---	--	---

3.	Mochammad Arfani, kolaborasi pentahelix dalam upaya pengurangan risiko bencana pada destinasi wisata di Desa Kalanganyar Sidoarjo(2022)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	pengurangan risiko bencana pada destinasi wisata di Desa Kalanganyar Sidoarjo	<p>hasil pembahasan dan data pendukung yang ada di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bahwa kolaborasi pentahelix dalam mengurangi risiko bencana pada destinasi wisata baik untuk wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah rawan bencana kategori sedang menurut data dari</p> <p>Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, seperti bencana alam dan bencana non alam yang terjadi. Badan Penanggulangan Bencana daerah Sidoarjo mempunyai fungsi dan tugas dalam penanganan masalah bencana di Kabupaten Sidoarjo, dengan membuat rencana dan program untuk pencegahan bencana melalui mitigasi bencana baik pra bencana, bencana maupun pasca bencana. Unsur Pentahelix yang ada di Kabupaten Sidoarjo berperan serta dalam penanganan bencana dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam penanganan bencana seperti dari unsur pemerintah, unsur</p>
----	---	---	---	---

				<p>akademisi, unsur dunia usaha, unsur masyarakat dan unsur media massa. Dengan melakukan kolaborasi pentahelix, masyarakat memperoleh bantuan pengetahuan tentang kebencanaan dan cara-cara mengurangi risiko bencana yang terjadi sehingga masyarakat mempunyai gambaran preventif tentang bencana.</p>
4.	<p>Fandi Ahmad, dan R.Arundina</p> <p>“Usulan mitigasi bencana kota bandung dengan pendekatan penta helix bandung city disaster mitigation proposal using penta helix approach” (2020)</p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>mengidentifikasi upaya pencegahan bencana di Kota bandung dengan pendekatan model sinergi penta helix</p>	<p>hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa usulan strategi untuk menimalisir bencana banjir di Kota Bandung, diantaranya: pengelolaan sampah terpadu, edukasi masyarakat, memperkuat kesadaran dalam menjaga lingkungan, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan produk olahan sampah dengan pendekatan nilai-nilai budaya kedaerahan. Penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi dari peran apa yang dapat diimplementasikan baik dari sisi pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga industri, dalam setiap strategi dan program yang diusulkan.</p>

5.	Tiffany Setyo Pratiwi , dan Hidayat Chusnul Chotimah Pemulihan pasca bencana erupsi di kawasan wisata merapi daerah istimewa yogyakarta ditinjau dari model pentha helix” (2022)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Upaya pemulihan dilakukan oleh berbagai pihak dari pemerintah dan sektor swasta dengan revitalisasi langsung melalui berbagai program. Penelitian ini akan memfokuskan seperti apa peran Penta Helix dalam pemulihan pasca bencana erupsi di kawasan wisata Merapi tahun 2010 hingga 2014	Dalam proses pemulihan wisata Merapi yang terdampak erupsi pada tahun 2010, sinergitas pentahelix dari lima aktor sangat mendukung percepatan pemulihan. Pemerintah yang berperan membuat kebijakan dan program pemulihan memperoleh dukungan dari aktor lainnya. Pemulihan terhadap objek-objek pariwisata di kawasan Merapi pasca erupsi
----	--	---	---	--

B. Konsep Teori Kolaborasi

1. Konsep Dasar dan Definisi Collaborative.

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk

bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Emily R. Lai menjelaskan (Pearson, 2011). "*Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence.*" Definisi tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui interaktivitas dan adanya saling ketergantungan. Selanjutnya Scott London mendefinisikan kolaborasi sebagai berikut:

As its Latin roots com and laborate suggest, collaboration reduced to its simplest definitions means "to work together. Collaborations holds widespread appeal to people from every position on the political spectrum, not because it offers everything to everyone (as some of the literature advocating collaboration seems to suggest), but because it deals with a process, as distinct from a program, agenda, or outcome. Collaboration prompts us to look at the very process by which we arrive at political choice, whatever those choice happen to be. Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada

urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Oleh sebab itu maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi organisasi sektor publik.

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani, 2007).

2. Karakteristik dan Prinsip Dasar Collaborative

Menurut Carpenter, kolaborasi mempunyai 8 (delapan) karakteristik, yaitu:

- a) Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis.
- b) Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan.
- c) Adanya tujuan yang masuk akal.
- d) Ada pendefinisian masalah.
- e) Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain.
- f) Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan.

g) Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan

h) Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi (Mason. A. & Sanders, 2009)

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, maka kolaborator (pihak yang terlibat dalam kolaborasi) harus memperhatikan beberapa komponen diantaranya budaya, kepemimpinan, strategi yang akan digunakan, tim yang terlibat serta struktur kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi;

- a. *Collaborative Culture*. Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.
- b. *Collaborative Leadership*. Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi
- c. *Strategic Vision*. Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan *keseluruhan* dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

d. *Collaborative Team Process*. Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

e. *Collaborative Structure*. Pembentukan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya. (Noorsyamsa, 2008)

Dalam konteks organisasi, masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus saling mengisi kerangka budaya kerja, sehingga cukup kuat untuk menggantikan hirarki. Kerangka kerja tidak harus berupa sebuah program atau teknik atau cara yang canggih untuk memanipulasi masa depan, akan tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, peningkatan hubungan kerja yang stabil, mendorong penetapan ketentuan-ketentuan baru, dan memungkinkan para pimpinan untuk menggunakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa kolaborasi memiliki karakteristik sebagai berikut; adanya budaya kerja yang terlepas dari hirarkhi sehingga mendorong penentuan pembuatan

ketentuan-ketentuan baru guna memberdayakan masing-masing pihak atau aktor untuk mencapai tujuan bersama. (Noorsyamsa, 2008)

3. Nilai Dasar Collaborative

Ada sejumlah nilai yang menjadi dasar dalam melakukan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut harus menjadi pegangan bagi kolaborator sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Menurut Djumara, terdapat tujuh nilai dasar (*The seven core values*) yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konsep kolaborasi, yaitu;

- a. Menghormati orang lain (*Respect for people*). Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya.
- b. Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu.
- c. Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Ketika semua pegawai merasa memiliki tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik.
- d. Konsensus (*Consensus*). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi

oleh keinginan untuk menang-menang (*win-win amounts to*). Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan harus *fullyagreed* untuk mencapai win-win. Ini artinya mereka harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan.

- e. Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Dalam paradigma hirarki biasanya orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan karena unit organisasinya. Faktanya setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.
- f. Hubungan saling mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua orang menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah yang menyulitkan dalam suatu organisasi.
- g. Pengakuan dan pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerjayang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau bekerja, dan segera memberi pengakuan terhadap hasil kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok (Noorsyamsa, 2008)

4. Bentuk-bentuk Collaborative

Berdasarkan beberapa referensi, terdapat tiga jenis bentuk kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

a. Kolaborasi Primer

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu grup. Menurut Ahmadi (2004), grup ini berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya. Kolaborasi dalam tipe ini terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok terdapat individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya.

b. Kolaborasi sekunder.

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder bercirikan sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Menurut Ahmadi (2004), Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari

pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sisni lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya

c. Kolaborasi Tertier

Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya.

5. Prinsip-Prinsip Dalam Collaborative

Collaborative atau dalam istilah lain adalah kerjasama, memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thomson dan Perry (Keban, 2008) yang menyatakan bahwa para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan antara koordinasi, kooperasi dan kolaborasi terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas. *Cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi.

Secara teoritis, kerjasama telah dikenal cukup lama, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rosen, "istilah kerjasama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scales*). Pembelian atau pembelian bersama misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi "*threshold points*", akan lebih menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya overhead (*overhead cost*) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil.

Agar dapat berhasil dalam melaksanakan kerjasama, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker (Keban, 2008) yang mengatakan bahwa prinsip dasar yang berlaku umum tersebut sebagaimana prinsip dasar dalam konsep *good governance* yaitu antara lain: a).Transparansi, b).Akuntabilitas, c).Partisipatif, d).Efisiensi, e).Efektivitas, f).Konsensus, dan g). Saling menguntungkan dan memajukan. (Keban. 2008)

Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga terdapat interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada

terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama.

6. Alasan, Manfaat dan Tujuan Collaborative

Belum menentukan jenis kerjasama yang akan dilakukan, masing-masing aktor atau lembaga harus terlebih dahulu memahami hal-hal yang menjadi permasalahan baik yang sedang dialami maupun yang akan dihadapi. Menurut menurut Charles Horton Cooley, (Abdulsyani, 2007). kolaborasi dapat timbul apabila masing-masing pihak memahami beberapa hal berikut:

- a. Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.
- b. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna

Kolaborasi merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh beberapa aktor/institusi dalam menjalankan aktifitas yang serupa. Dengan melakukan inovasi, maka diharapkan aktor-aktor atau

lembaga-lembaga dapat menggapai tujuan dengan lebih efektif. Oleh karena itu maka inovasi dalam berkolaborasi haruslah memiliki tujuan yang positif. Diantara tujuan kolaborasi secara umum adalah;

- a. memecahkan masalah;
- b. menciptakan sesuatu; dan
- c. menemukan sesuatu di dalam menghadapi sejumlah hambatan

Kolaborasi menurut Emily R. Lai adalah “*mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together.*”

Maksudnya adalah bahwa kolaborasi merupakan hubungan timbal balik antar para peserta yang melakukan kolaborasi dalam upaya menjalin hubungan yang terkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah masalah secara bersama.

7. Tahapan Dalam Collaborative

Untuk melaksanakan kolaborasi diperlukan beberapa tahapan. Ada tiga tahap penting dalam kolaborasi

- a. Tahap I Problem Setting. Problem setting adalah upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.
- b. Tahap II Direction Setting. Yaitu menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok. Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

c. Tahap III Implementation. Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan kolaborasi, maka diperlukan beberapa tahapan penting yaitu;

- a) Inisiasi dan motivasi,
- b) Media komunikasi/informasi,
- c) Analisis bersama terhadap situasi,
- d) Negosiasi dan kesepakatan diantara stakeholder,
- e) Membangun kapasitas perubahan,
- f) Kemitraan dan analisis pelaksanaan,
- g) Membuat dan memelihara proses, dan
- h) Membuat dan mendorong mekanisme kelola konflik.

8. Tipe-tipe Collaborative

Menurut Sossay (Choirul, 2020) terdapat beberapa tipe dalam kolaborasi. Setidaknya ada 5 (lima) Tipe Kolaborasi ;

(1) *Strategic Alliances*, yaitu apabila dua atau lebih organisasi saling bekerjasama dan berbagi sumberdaya, pengetahuan, dan kapabilitas dengan tujuan meningkatkan keunggulan bersaing antar para partner. Aliansi Strategis dapat digunakan untuk menemukan teknologi baru, penetrasi pasar baru, memperoleh pengetahuan dari pemimpin industri. (2) *Joint Ventures*, (3) *Cooperative Arrangements*, (4) *Virtual Collaboration*, dan (5) *Integration*.

Tidak semua kegiatan pemerintahan dapat dilakukan sendiri dengan berbagai alasan, baik alasan teknis, alasan penguasaan, maupun semata-mata alasan keuangan. Maka diperlukan beberapa pihak untuk bersama-sama mendirikan satu institusi baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Usaha bersama atau yang biasa disebut *Joint Venture* merupakan suatu pengertian yang luas. *Joint Venture* tidak saja mencakup suatu kerja sama antar masing-masing pihak dalam melakukan penyertaan modal (*equity joint ventures*), tetapi juga dapat membentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, dan sifatnya tidak permanen. Dalam menjalankan *Joint Venture* terdapat dua pola yang sifatnya umum, pertama mengarah pada terbentuknya suatu badan hukum, sedangkan pola yang kedua perwujudannya dalam berbagai bentuk kontrak kerjasama (*contractual joint ventures*) seperti dalam bidang manajemen (*management contract*), pemberian lisensi (*license agreement*), bantuan teknik dan keahlian (*technical assistance and know-how agreement*), dan sebagainya. Dengan *joint venture* diharapkan dapat menghimpun sinergi dari berbagai pihak, khususnya pihak yang menguasai pasar dan pihak yang menguasai teknologi, produk maupun modal finansial.

C. Konsep Bencana

1. Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah sebagai berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sedangkan definisi bencana (*disaster*) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa 21 manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Berdasarkan keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwasannya bencana adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan dampak kerusakan pada kehidupan baik secara ekologis maupun kehidupan manusia itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu:

- a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
- c) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- d) Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Menurut Nurjanah dkk (Putranto, 2019)terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya bencana yaitu :

- a) Faktor alam (*natural disaster*) yaitu karena adanya fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- b) Faktor non-alam (*non-natural disaster*) yaitu faktor penyebab yang bukan disebabkan oleh alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia.
- c) Faktor sosial atau manusia (*man-made disaster*) yaitu penyebab bencana yang di akibatkan oleh perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal dan terorisme.

4. Dampak Bencana

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana Nurjanah dkk, (Putranto, 2019)

Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur atau aset, lingkungan atau ekosistem, politik, hasil-hasil pembangunan, dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas atau kemampuan (*capacity*) untuk menanggulangi bencana.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Bencana

Menurut Nurjanah (Putranto, 2019) menyebutkan faktor yang mempengaruhi bencana yaitu :

a) Bahaya (*Hazard*)

Bahaya merupakan suatu fenomenan alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Bahaya dikelompokkan menjadi 2 yaitu bahaya alami yang terdiri dari bahan geologi, hidrologi-meteorologi, biologi dan lingkungan. Sedangkan bahaya buatan manusia yang terdiri dari kegagalan teknologi, degradai, lingkungan dan konflik.

Kerentanan (*Vulnerability*) Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kerentanan fisik Menggambarkan suatu kondisi fisik yang rawan terhadap faktor bahaya tertentu seperti persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, jaringan listrik, rasio panjang jalan dan jalan kereta api.
- 2) Kerentanan sosial Menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bencana seperti kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan persentase penduduk usia balita-lansia.

- 3) Kerentanan ekonomi Menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bencana seperti persentase rumah tangga yang bekerja di sector rentan dan persentase rumah tangga miskin.
- 4) Kerentanan lingkungan Menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan lingkungan dalam menghadapi bencana meliputi ketersediaan atau kerusakan sumber daya seperti lahan, udara dan air.

b) Resiko bencana (Disaster Risk)

Resiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Secara umum bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana, baik alam maupun non alam. Kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman. Semakin tinggi bahaya dan kerentanan akan semakin besar resiko bencana yang dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko bencana yaitu melalui penurunan tingkat kerentanan karena hal ini relative lebih mudah dibandingkan dengan mengurangi atau memperkecil bahaya, social dan lingkungan.

D. Pentha Helix

Pentha helix saat ini menjadi trobosan dan strategi baru di jaman milenial ini bahkan beberapa kepala daerah sudah menjadikan konsep pentha helix sebagai strategi baru untuk menangani beberapa masalah

yang terjadi di daerahnya, Pentha Helix sendiripun cukup menjadi kunci dalam permasalahan kolaborasi pemerintah dalam menangani lingkungan kumuh yang masih ada di kota Malang. Pentha Helix sendiri sudah di adakan di forum Pentha helix dalam Sinergi Industri Bersih Kota Cimahi” pada hari 41 Rabu (20/02/2019) di ruang Rektorat IKIP Siliwangi Jalan Terusan Jenderal Sudirman Cimahi. <http://www.edupublikjabar.com/>

Pentha helix juga menjadi salah satu tema dalam forum diskusi dan seminar dengan mendatangkan berbagai praktisi dan pembicara dalam forum seminar itu, fokus pada bagaimana pengembangan entrepreneurship oleh akademisi, Bisnis, Community, Government, Media atau seringkali disingkat menjadi ABCGM dan hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap stakeholders dalam membangun entrepreneurship yang seringkali dianggap kurang optimal. Mendiskusikan konsep pentha Helix ini karena bisnis yang saat ini di kembangkan oleh para entrepreneur, mulai dilirik oleh para akademisi untuk di kembangkan, dan termasuk menjadi salah satu konsep yang di kembangkan oleh para akademisi. Lihat saja bagaimana kampus kampus mempertajam konsep ini agar dapat diimplementasikan dengan optimal oleh para stakeholders yang relevan dengan pengembangan entrepreneurship untuk negara ini.

Kolaborasi dalam konsep Penta Helix merupakan kegiatan kerjasama antar bidang Academic, Business, Community,

Government, dan Media, atau dikenal sebagai ABCGM hal ini untuk mempercepat pengembangan sebuah negara. Adapun komunitas atau Community yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama akan saling mencari dan berkolaborasi. Pentha Helix akan menjadi konsep dan sumber pengetahuan bagi pemerintah dengan teori-teori terbaru yang relevan.

Pemerintah juga harus di optimasi oleh setiap entrepreneur dalam mengembangkan tujuan karena berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak kalah penting adalah media yang harus di optimasi untuk kepentingan bersama dan membrandingkan diri untuk kepentingan bersama, dengan saling mengoptimasi satu sama lain, sehinggasama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Inilah yang harus di manfaatkan oleh Pemerintah dalam konsep pentha helix, dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peran stakeholders, berikut merupakan paparan analisis peran stakeholders pada model Pentha Helix di antara lain:

1. *Academic* Akademisi pada model Pentha Helix berperant sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan ketrampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan.
2. *Business*. Bisnis pada model Pentha Helix berperan sebagai enabler. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis

dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai enabler yang menghadirkan infrastruktur.

3. *Community*. Komunitas pada model Pentahelix berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu memudahkan tujuan dan rencana bersama.
4. *Government*. Pemerintah pada model Pentahelix berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab.
5. *Media*. Media pada model Pentahelix berperan sebagai expender. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat brand image dalam sebuah program dan melalui website atau media lainnya sebagai media untuk promosi dan informasi.

E. Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan

darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007). (Pranata & Rusli, 2019)

Manajemen bencana menurut Nurjanah (Putranto, 2019) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen bencana menurut (*University British Columbia*) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual. (Universitas & Kuala, 2019) Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup;
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman;
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;

5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.



Sumber :UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

1. Tahap Pra Bencana (mencangkup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).

- a. Pencegahan (*prevention*) Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya : Melarang pembakaran hutan dalam perladangan, Melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan Melarang membuang sampah sembarangan.
- b. Mitigasi Bencana (*Mitigation*) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui
 - a) pelaksanaan penataan ruang;
 - b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c) penyelenggaraan pendidikan, 26 penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).
- c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*) Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain:

- a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e) penyiapan lokasi evakuasi;
 - f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan
 - g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- d. Peringatan Dini (*Early Warning*) Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus :
- Menjangkau masyarakat (*accessible*),
 - Segera (*immediate*),
 - Tegas tidak membingungkan (*coherent*),
 - Bersifat resmi (*official*)

2. Tahap saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian

a. Tanggap Darurat (*response*) Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain:

- 1) pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penaangulangan Bencana).

b. Bantuan Darurat (*relief*) Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara,

kesehatan, sanitasi dan air bersih (M. Nasrullah, M. Dirhamsyah, 2019)

3. Tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

a. Pemulihan (*recovery*) Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan 28 kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah

- a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d) pemulihan sosial psikologis;
- e) pelayanan kesehatan;
- f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) pemulihan sosial ekonomi budaya, dan
- h) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rehabilitasi (*rehabilitation*) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.(Bachtiar W. Mutaqin, Ikhwan Amri, 2019)

- c. Rekonstruksi (*reconstruction*) Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkahlangkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan masyarakat kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian

harta benda. Dan yang terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya.

Pengendalian itu dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk peraturan nagari dan peraturan daerah atas manajemen bencana. Yang tak kalah pentingnya dalam manajemen bencana ini adalah sosialisasi kehati-hatian terutama pada daerah rawan bencana.

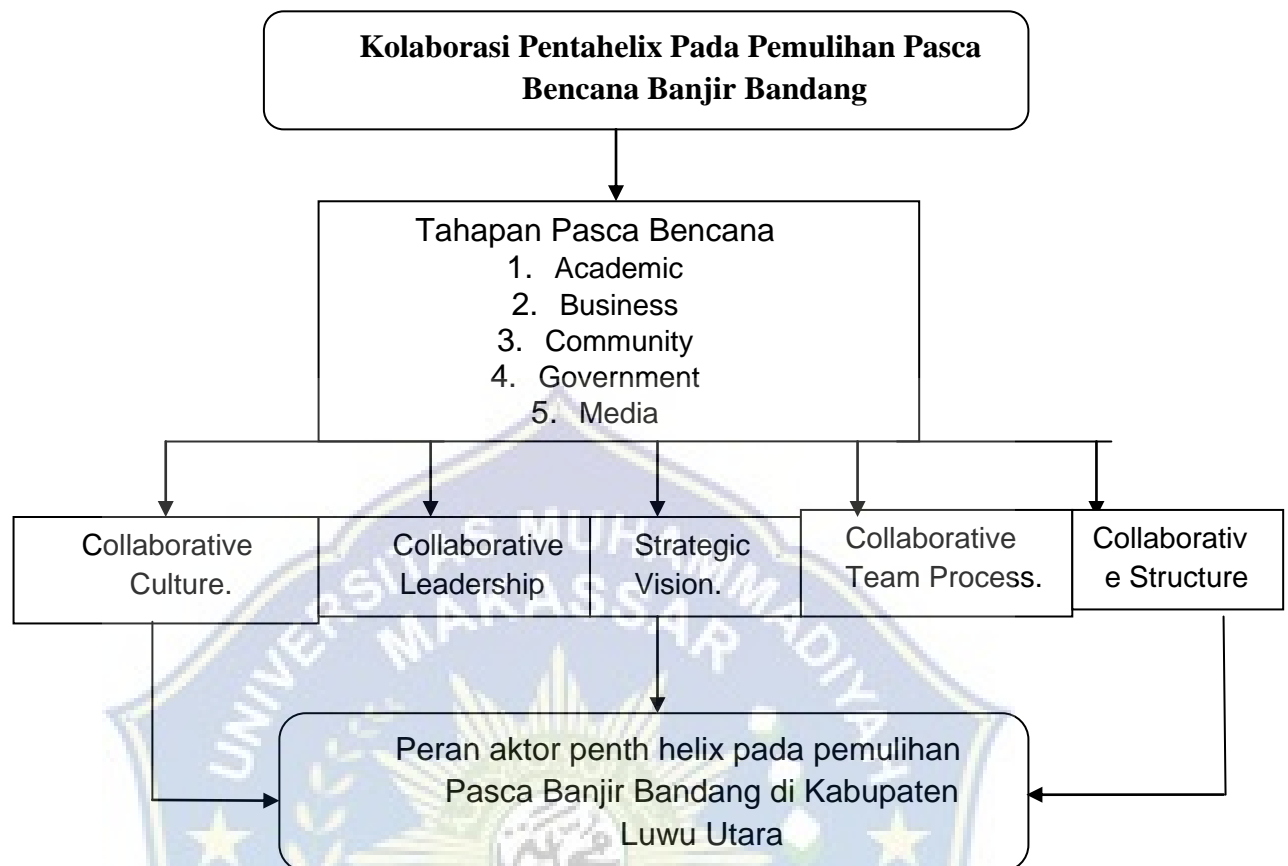
F. Kerangka Pikir

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat..

Melalui teori kolaborasi Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara (Noorsyamsa, 2008) bahwa dengan

menggunakan lima komponen pada kolaborasi yakni 1) *Collaborative Culture* 2) *Collaborative Leadership* 3) *Strategic Vision* 4) *Collaborative Team Process*. 5) *Collaborative Structure*. Dengan penggunaan model pentahelix mencakup lima aktor yang melakukan kerjasama 1) *Akademik* 2) *Bisnis* 3) *Community* 4) *Government* 5) *Media* diharapkan manajemen bencana di Luwu Utara dengan melibatkan seluruh aktor pentahelix merupakan salah satu kunci untuk membangun sinergi guna pemulihan pasca bencana di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini dapat menjadi senjata baru bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Kemudian pada kolaborasi peran aktor pentahelix sangat diperlukan untuk mampu mengatasi dampak bencana pada pemulihan dampak bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan tahapan manajemen penulis menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut :



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berada pada kolaborasi dengan aktor pentahelix pada pemulihan bencana di Kabupaten Luwu Utara dalam pemulihan Pasca Banjir Bandang yang terjadi pada tahun 2020

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Kolaborasi pentahelix pada pemulihan pasca banjir bandang yakni merupakan aktivitas kerja sama dari kelima aktor pentahelix pada pemulihan pasca banjir bandang di Kab. Luwu Utara.
2. *Academic* yakni dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan yang digunakan

sebagai pendekatan dalam melakukan proses pemulihan kebencanaan di Kabupaten Luwu utara

3. *Business* yakni Bisnis berperan sebagai enabler yang menghadirkan infrastruktur pada proses pemulihan kebencanaan di Kabupaten Luwu utara
4. *Community* yakni Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu memudahkan tujuan dan rencana bersama pada proses pemulihan kebencanaan di Kabupaten Luwu utara
5. *Government* berperan sebagai kontroler dan pemegang kebijakan yang memiliki peraturan dan tanggung jawab pada proses pemulihan kebencanaan di Kabupaten Luwu utara
6. Media yakni sebuah program dan melalui website atau media lainnya sebagai media informasi proses pemulihan kebencanaan di Kabupaten Luwu utara
7. *Collaborative Culture* adalah nilai-nilai yang bentuk pada aktivitas kolaborasi dari kultur yang dimiliki daerah sekitar dan pengaruh kultur dari luar pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kab. Luwu Utara.
8. *Collaborative Leadership* adalah fungsi yang melibatkan posisi yang ada dalam melibatkan masing-masing organisasi yang ikut serta dalam melakukan kolaborasi pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kab. Luwu Utara.

9. *Strategic Vision* adalah prinsip-prinsip yang digunakan pada proses aktivitas kerjasama serta memiliki khas/ciri tersendiri untuk pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kab. Luwu Utara.
10. *Collaborative Team Process* adalah sekumpulan aktivitas-aktivitas kerjasama baik itu pada pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas kerjasama pada aktivitas pemulihan pasca banjir bandang di Kab. Luwu Utara.
11. *Collaborative Structure* yakni merupakan pendukung proses kerjasama baik itu sumberdaya manusia maupun sistem informasi yang tersedia untuk proses pemulihan pasca banjir bandang di Kab. Luwu Utara.
12. Peran aktor pentahelix pada pemulihan banjir bandang di Kab. Luwu Utara yakni adalah aktivitas yang dilakukan para aktor pentahelix dalam memulihkan kembali sektor yang terkena dampak banjir bandang di Kab. Luwu Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada saat proposal penelitian ini diterima hingga selesai, Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara daerah terdampak banjir bandang Masamba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Yusuf (2014:330) memaknai penelitian kualitatif adalah proses penemuan dan pengumpulan, analisis dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Adapun tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

C. Informan

Informan penelitian menurut Moleong (2015 :163) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Informan penelitian terdiri tiga macam adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci, yakni mereka yang mengetahui dan mempunyai berbagai informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Informan utama, ialah yang terlibat secara langsung dalam berhubungan sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yang bisa memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam berhubungan sosial yang diteliti.

Pemilihan informan menjadi pokok data dalam penelitian ini ialah bersumber pada azas pokok yang menguasai permasalahan, mempunyai data, dan siap memberikan informasi lengkap dan akurat.

Penelitian kualitatif tidak dipermasalahkan jumlah informan tetapi bisa disangkutkan pada jelas tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari beragam peristiwa sosial yang diteliti. Dengan itu, informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, berbeda dengan penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara purposive dilandasi tujuan dan pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencarian informasi akan diberhentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah tepat. Berikut nama-nama informan yang di wawancarai peneliti :

Tabel 2
Informan penelitian

No	Informan
1.	Bupati Luwu Utara
2.	Pemilik Sektor Swasta
3.	BPBD Kab. Luwu Utara
4.	Sektor Pendidikan
5.	Masyarakat
6.	Jurnalis
7.	Dinas Sosial Kab. Luwu Utara

D. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Salahsatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat dikatakan komunikasi tatap muka (*Face to Face*) antara penanya/pewawancara dengan yang ditanya/ sumber informasi.

2. Observasi

Salahsatu proses yang bisa dilakukan untuk untuk mengetahui atau menyelidik tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan observasi.

3. Dokumen dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah lama. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terikat dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto. Dokumentasi tertulis dapat berupa kenangan, biografi, karya tulis, dan cerita. Disamping itu ada pula material budaya atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Pengabsahan Data

Adapun untuk menguji keabsahan datanya pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun, Dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dilapangan melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data selama di lapangan berdasarkan model miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman Dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Peran Pemerintah Luwu Utara dalam Pemulihan Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi Kabupaten Luwu Utara

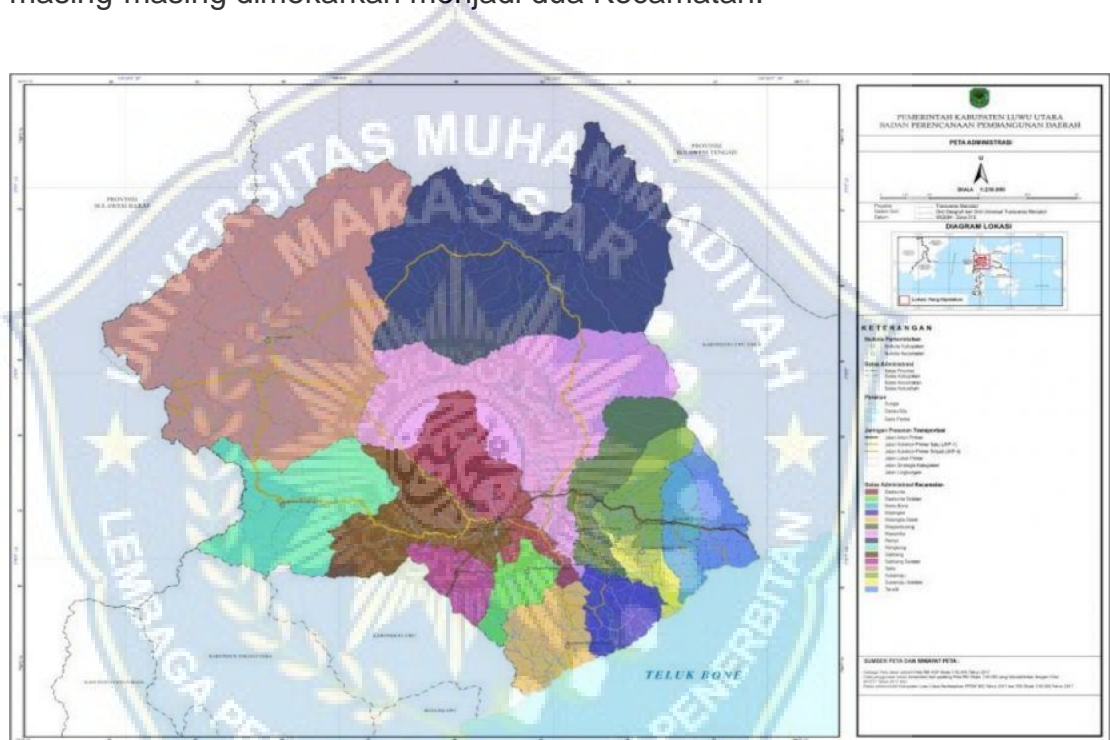
Gambaran Geografis dan Administratif Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara $01^{\circ} 53' 019''$ - $02^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 47' 46''$ – $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab.Luwu dan Teluk Bone
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 Km² terbagi dalam 15 kecamatan yang terdiri dari 7 perkotaan dan 166 pedesaan. Diantara 15 Kecamatan di Luwu Utara, Kecamatan Seko merupakan Kecamatan yang terluas dengan luas 2.109,19 Km² atau 28,11 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang terletak paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara yakni berjarak 198 Km. Terluas kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km² atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75Km²

atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2019)

Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Perda pemekaran untuk 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sabbang, Baebunta, dan Sukamaju yang kemudian masing-masing dimekarkan menjadi dua Kecamatan.



(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kabupaten Luwu Utara)

Beberapa daerah yang masuk yang rawan terkena bencana banjir, hal ini di karenakan keempat daerah tersebut di apit oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: sungai Rakkong, sungai Baebunta, dan sungai Masamba yang merupakan tiga dari delapan sungai besar berada di Kabupaten luwu Utara. Dengan karakteristik tanah dan bebatuan yang berada pada 48 lereng curam memicu terjadinya longsor sehingga

membentuk bendungan alami yang tidak stabil, kondisi bendungan alami yang tidak stabil akan mudah jebol bila akumulasi debit air tinggi yang di picu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan berkelanjutan akan memicu terjadinya bencana banjir bandang dan berdampak pada daerah pemukiman warga.

2. Kondisi Topografi & Hidrologi Luwu Utara

Berdasarkan kondisi topografinya Kabupaten Luwu Utara terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu Utara.

Kemiringan lahan di Kabupaten Luwu Utara diklasifikasikan ke dalam 5 kelas yaitu landai/dataran rendah (0–8 persen), landai bergelombang (3–15 persen), bergelombang (8–15 persen), berbukit (15–30 persen) dan perbukitan terjal/curam (>30 persen).

Kondisi secara hidrologi yang berada di Kabupaten Luwu Utara sangat berkaitan dengan tipe iklim yang ada di Kabupaten Luwu Utara serta kondisi geologi yang ada. Pada umumnya kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tadah hujan serta sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya aliran sungai yang terbentuk. Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan aluvial dan endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada keadaan dan jenis lapisan batuan. Di wilayah wilayah

Kabupaten Luwu Utara terdapat 8 (delapan) sungai besar yang melintas diwilayah tersebut, dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang sekitar 108 Km dan melewati 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sabbang, Baebunta, dan Kecamatan Malangke.

Sistem aliran hidrologi di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa pergerakan air permukaan maupun air tanah, langsung menuju ke air laut. Aquifer umumnya terdapat pada lapisan pasir, kerikil dan lapisan tipis batu gamping. Salah satu keunggulan dari sungai-sungainya adalah kondisi air yang masih jernih dan bening. Sumber daya air khususnya air permukaan sangat melimpah didaerah Luwu Utara. Sebagian kecil dari potensi air permukaan telah dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, pembangkit listrik dan bididaya perikanan. Potensi air tanah dangkal terbatas didaerah dataran rendah.

Berdasarkan kondisi geohidrologinya, maka Kabupaten Luwu Utara dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik seperti berikut :

- 1) Wilayah Dataran Rendah (Sabbang, Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, Sukamaju Bone-BonedanTanaLili) dengan ketebalan tanah yang dalam, memiliki ketersediaan air yang cukup untuk kegiatan pertanian

- 2) Wilayah Perbukitan yang berada pada bagian utara (Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju dan juga Bone-Bone) dengan kedalaman tanah dangkal, memiliki ketersediaan air yang terbatas untuk kegiatan pertanian.
- 3) Wilayah Perbukitan/Pengunungan (Limbong, Seko, Masamba, dan Rampi) memiliki ketebalan tanah sangat dangkal, tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian

3. Sejarah Kabupaten Luwu Utara

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun1999.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu:

Kec. Sabbang, Kec. Pembantu Baebunta, Kec. Limbong, Kec. Pembantu Seko, Kec. Malangke, Kec. Malangke barat, Kec. Masamba, Kec. Pembantu Mappedeceng, Kec. Pembantu Rampi, Kec. Sukamaju, Kec. Bone-bone, Kec. Pembantu Burau, Kec. Wotu, Kec. Pembantu Tomoni, Kec. Mangkutana, Kec. Pembantu Angkona, Kec. Malili, Kec. Nuha, Kec. Pembantu Towuti

Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km², dengan Kecamatan masing-masing: Kec. Angkona, Kec. Burau, Kec. Malili, Kec. Mangkutana, Kec. Nuha, Kec. Sorowako, Kec. Tomoni, Kec. Tomoni Utara, Kec. Towuti dan Kec. Wotu. Dengan demikian, pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone Bone.

4. Visi Misi Kabupaten Luwu Utara

a. Visi

“LUWU UTARA MAJU, MANDIRI, DAN HARMONIS”

b. Misi

- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel.
- Mewujudkan pelayanan dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- Memperkuat konektivitas infrastruktur.
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal.

5. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Luwu Utara, dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial, sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial;

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial; pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sosial; pelaksanaan administrasi Bidang Sosial; pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Program dan kegiatan dinas Sosial; pelaksanaan evaluasi dan Program Bidang Sosial; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

II. Sekretaris

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan Program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

perencanaan Program dan Kegiatan, pelaksanaan Program dan kegiatan, pengelolaan urusan, pembinaan dan Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang, pengendalian, evaluasi dan Program pelaksanaan tugas, pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut dan sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Program dan Pelaporan

III. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

IV. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan,

mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

V. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin

6. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Daerah Kab. Luwu Utara.

Dikutip dari Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 79 tahun 2016 sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas BPBD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan Badan;
 - b. penyusunan Rencana Strategis;
 - c. penyelenggara pelayanan umum di BPBD;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan BPBD; dan
 - e. penyelenggaraan evakuasi program dan kegiatan BPBD.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

- 1) Unsur pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- 2) Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Badan dalam penanggulangan bencana.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
- 4) unsur pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat.

- 1) Unsur Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulanagn bencana; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Paragraf 1 Kepala Pelaksana

Pasal 8

- 1) Unsur Pelaksana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- 2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara integrasi meliputi prabencana, saat tangga darurat dan pasca bencana.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- 4) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. pengkomandoan penyelenggara penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah;
 - b. menyusun Rencana Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan serta masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat serta pasca bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - d. mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - e. melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana;
 - g. mengkoordinasikan penentuan status keadaan bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain;
 - h. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana agar tercipta keterpaduan;

- i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana agar tercapai sasaran kinerja penanggulangan bencana;
- j. mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- k. memberikan sarana dan pertimbangan kepada Badan baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- l. menyusun dan menetapkan LAKIP, penyelenggaraan pemerintahan keterangan pertanggungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya pada Badan berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan, dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik sarana lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan ungsi agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sekretariat Unsur Pelaksanaan

Pasal 9

- 1) Sekretariat Unsur Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- 3) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi,

- tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana;
 - d. fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- 4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan Kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia hasil pelaksana tugas bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan Badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
 - d. membina dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujud pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
 - e. mengkoordinasikan penyediaan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana yang meliputi pemantauan dan evakuasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan

- melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP/SAKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

- 1) Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan gejala bencana dan informasi dini gejala bencana serta penanganan kebakaran.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - b. Pemantauan, penetapan mengkonfirmasi peta rawan dan penanggulangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

- b. Membagi tugas, member Petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana, untuk pedoman penanggulangan bencana;
- d. Mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan Pencegahan Penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan, dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- g. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- i. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. Melaporkan hasil pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan kedinasaan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

7. Media INPUTSULSEL

Perusahaan ini dinamakan PT. INPUT INTER MEDIA INDONESIA, Didirikan pada tahun 2016. Nama media pemberitaan INPUTSULSEL.COM (Informasi Seputar Sulawesi Selatan), Kami tampil sebagai media yang berupaya untuk memberikan wawasan dan inspirasi bagi masyarakat yang haus akan informasi.

Slogan Media

Slogan dari Input Sulsel adalah Menggenggam Berita. Slogan ini dipilih atas pertimbangan bahwa di era modern sekarang ini, seperti penggunaan gadgate bisa lebih mendekatkan berita kepada masyarakat melalui teknologi.

Alamat Perusahaan

Perusahaan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 Masamba, Luwu Utara Sulawesi Selatan

B. Kolaborasi Pentha helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara.

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam.

Kolaborasi pada penelitian ini digunakan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh kelima aktor pentahelix dalam percepatan pemulihan dampak pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, adapun kelima aktor pentahelix 1) *Akademik* 2) *Bisnis* 3) *Community* 4) *Government* 5) *Media*.

Dengan menggunakan teori kolaborasi dan aktor pentahelix sebagai indikator kerjasama pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara kemudian dipisah menjadi perindikator berdasarkan prinsip kolaborasi demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Collaborative Culture

Collaborative culture ini merupakan Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

Dengan berdasarkan indikator *collaborative culture* tersebut dengan melakukan kerja sama dengan aktor pentahelix, peneliti melakukan wawancara bersama aktor pentahelix dan aktor-aktor yang berkaitan dengan kolaborasi pada percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandang. Adapun informan pada penelitian ini, Bupati Luwu Utara, Kepala pelaksana tugas harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kepala Dinas sosial Kab. Luwu Utara, Pemilik sektor bisnis yakni pengelola Sentral Bisnis

Masamba, kordinator KKN tematik Unhas, Ketua LPPM Universitas Andi Djemma, beberapa masyarakat, dan jurnalis dari media yang terlibat pada percepatan pemulihan dampak banjir bandang di Luwu Utara.

Berdasarkan indikator *collaborative culture* pada kolaborasi pentahelix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, terkait mengenai nilai-nilai kultur pada kolaborasi pemulihan pasca bencana banjir dengan masing-masing aktor pentahelix. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama IDP selaku Bupati Luwu Utara yakni sebagai berikut :

“...kita sangat menghargai nilai-nilai kultural apapun itu dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, apa lagi kita ini berada dipayung kerajaan yang sangat menjunjung nilai-nilai kultur, tentu pemerintah daerah sebagai salah satu bahkan aktor yang berperan dominan pada percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang, contohnya nilai-nilai kultural ini pada prosesnya tetap berdasarkan kearifan lokal, pengambilan keputusan sebagai kepala daerah juga dari berbagai aspek baik itu aspek kultur masyarakat setempat, karena di luwu utara ini kita adalah multikultural dan dampak banjir bandang juga tidak di satu titik melainkan ada 6 kecamatan yang terkena dampak banjir bandang. Oleh karena itu nilai-nilai kultur masyarakat tetap harus diperhatikan...” (Wawancara, Masamba 12 Juni 2023)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya *collaborative culture* dari pemulihan bencana banjir bandang di Luwu Utara, pemerintah tentu tetap menghargai nilai-nilai kultural masyarakat setempat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama MM selaku

kepala kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...pemulihan pasca bencana sudah seharusnya berdasarkan kearifan lokal, pada pemulihan bencana sangat banyak yang bisa dilakukan, dengan strategi penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal, pemulihan dampak bencana ini juga bagian yang terkait dengan penanggulangan bencana, kearifan lokal masyarakat dengan memberikan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat setempat karena bencana bisa terulang dan terjadi kapan saja, masyarakat yang menjadi korban bencana juga diberikan pemulihan trauma healing dan itu berbasis kearifan lokal masyarakat dan nilai-nilai kultur yang bisa diterima oleh korban yang terdampak bencana...”
(Wawancara, Masamba 14 Juni 2023)

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemulihan bencana dengan kolaborasi kultur dilakukan dengan kearifan lokal masyarakat setempat, dengan penanggulangan bencana proses pemulihan pemerintah dengan kearifan lokal yang dimiliki dan dibantu oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama JS selaku PLT kepala dinas sosial Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...nuansa kearifan lokal dengan kaitannya pemulihan pasca bencana sangat kuat, pemerintah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, dengan kearifan lokal membangun kerjasama, bergotong royong kembali memulihkan sebisa kita secara bertahap, sehingga pemulihan disemua sektor bisa terpenuhi...”
(Wawancara, Masamba 15 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas diketahui bahwasannya kolaborasi kultur digunakan dalam percepatan pemulihan pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, dengan melakukan kerjasama dan gotong royong pada seluruh sektor yang berperan dalam pemulihan dampak

bencana. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama TK pengelola sektor swasta dalam hal ini pengelola sentra bisnis masamba yang memiliki peran pada pemulihan dampak bencana banjir di bidang ekonomi :

“...kami bekerja sama melakukan kolaborasi bersama pemerintah khususnya dinas DP2KUKM serta BPBD dan dinas sosial memberikan kesempatan kepada korban yang terdampak bencana kemarin tentu dengan berdasarkan nilai-nilai masyarakat dan kearifan lokal memberikan kesempatan untuk mengisi tenan di sentra bisnis masamba dengan tidak membebankan biaya selama 3 bulan kepada pelaku UMKM untuk bisa memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang...” (Wawancara, Masamba 17 Juni 2023)

Dari wawancara diatas berdasarkan aktor pentahelix masuk kepada kategori aktor pentahelix bisnis melakukan kolaborasi dengan mengambil peran dengan memberikan kesempatan masyarakat meningkatkan sektor perekonomian korban yang terkena dampak bencana banjir, tentu dengan melakukan pendekatan kearifan lokal yang terus dilakukan oleh semua pihak. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama IA selaku kordinator kkn tematik kebencanaan di luwu Utara, mengatakan bahwa :

“...dengan diadakannya kkn tematik yang dilakukan universitas hasanuddin dalam membantu percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang, universitas hasanuddin melakukan kerjasama mengirimkan mahasiswa untuk membantu pemulihan dibebberapa bidang, kalau untuk nilai-nilai dan kultur masyarakat dalam hal ini kearifan lokal kita ada namanya KKN tematik sagu, karena sagu merupakan komoditi yang sangat lekat dengan masyarakat di Luwu utara, jadi kkn ini berfokus kepada komoditi sagu kemudian kita serahkan ke mahasiswa untuk membuat program kerja

yang sesuai dengan tematiknya...” (Wawancara, Masamba 5 Juni 2023)

Dengan wawancara diatas menyatakan bahwasannya aktor pentahelix akademik berperan pada pemulihan pasca bencana banjir pada kolaborasi kultur yang di terapkan universitas hasanuddin yakni dengan melakukan knk tematik yang berfokus pada komoditi sagu yang merupakan kearifan lokal di Luwu Utara. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama TR selaku Dosen di Universitas Andi Djemma Palopo mengatakan

“Universitas kami berkomitmen berkolaborasi dengan pemda luwu utara untuk pengembangan, khususnya secara kultur luwu utara punya buah lokal, jeruk malangke yang saat ini sudah jarang ditemui dari segi kultural dan kearifan lokal ini yang menjadi ciri khas dari satu daerah yang kemudian dikembangkan dan menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Kami menyebut kolaborasi ini multi kultural karena kita adopsi pengembangan dari pertanian untuk memproduksi bibit jeruk ini...” (Wawancara, Masamba 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa universitas Andi Djemma Palopo melakukan pengembangan tanaman lokal masyarakat dengan penggabungan multikultur pertanian dari jepang untuk. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama RM selaku salah satu jurnalis dan penggiat jurnalis warga di Luwu Utara mengatakan bahwa

:

“...peran jurnalis terkait dengan kolaborasi kultur yang dilakukan oleh jurnalis, ini ada pada jurnalis warga sureg, dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat diajak untuk mampu menjadi jurnalis yang berguna untuk percepatan informasi dari masyarakat pada peristiwa-peristiwa disekitar masyarakat...” (Wawancara, Masamba 16 Juni 2023)

Dari wawancara diatas bahwasannya kolaborasi jurnalis dari aktor pentahelix media, dengan menjadikan masyarakat sebagai jurnalis menjadikan media dalam bentuk kearifan lokal serta percepatan informasi yang diterima media menjadi semakin lebih mudah. Kemudian juga dilakukan wawancara dengan masyarakat ISL mengenai pemulihan banjir bandang mengatakan :

“...masyarakat memiliki peran yang cukup besar disemua sektor, dalam hal kultur dan nilai yang dianut masyarakat yang beragam, luwu utara memiliki masyarakat adat bekerjasama dengan pemerintah menjaga lingkungan alam sekitar seperti hutan, sehingga penguatan kebencanaan menjadi lebih baik, kurangnya resiko bencana sehingga percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandang tidak memakan waktu yang lama akibat bencana susulan lainnya dari lingkungan...” (Wawancara, Masamba 10 Juni 2023)

Dari wawancara diatas diketahui bahwasannya masyarakat bagian dari komunitas aktor pentahelix, dalam hal kolaborasi kultur melibatkan masyarakat adat dengan kearifan lokal yang sangat kental berfungsi menjaga lingkungan alam sekitar sebagai bentuk penguatan dari mitigasi bencana.

Dari indikator kolaborasi kultural, aktor pentahelix masing-masing memiliki perannya pada percepatan pemulihan pasca bencana banjir, pemerintah sebagai center aktor mendukung penuh nilai-nilai kultural masyarakat pada proses percepatan pemulihan pasca bencana dan didukung oleh sektor swasta pada pemulihan ekonomi yang tentu tidak lepas dari kepedulian dan kearifan lokal masyarakat, sehingga

masyarakat adat bergandengan dengan pemerintah dalam penguatan mitigasi bencana, dan pengurangan resiko bencana, hingga pihak akademik pun memiliki peran pada kolaborasi kultur dan pengembangan kapasitas masyarakat kedepan sedangkan untuk media bertumbuh dan berkolaborasi dengan kearifan lokal dengan menjadikan masyarakat sebagai jurnalis dadakan dan mampu menyampaikan informasi dengan professional.

2. Collaborative Leadership

Collaborative Leadership merupakan suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

Dengan berdasarkan indikator *collaborative leadership* tersebut dengan melakukan kerjasama dengan aktor pentahelix, peneliti melakukan wawancara bersama aktor pentahelix dan aktor-aktor yang berkaitan dengan kolaborasi pada percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandang. Adapun informan pada penelitian ini, Bupati Luwu Utara, Kepala pelaksana tugas harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kepala Dinas sosial Kab. Luwu Utara, Pemilik sektor bisnis yakni pengelola Sentral Bisnis Masamba, kordinator KKN tematik Unhas, Ketua LPPM Universitas Andi Djemma, beberapa masyarakat, dan jurnalis dari media yang terlibat pada percepatan pemulihan dampak banjir bandang di Luwu Utara.

Berdasarkan indikator *collaborative leadership* pada kolaborasi pentha helix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, terkait mengenai gaya kepemimpinan pada seluruh aktor pentahelix untuk melakukan kolaborasi pada pemulihan pasca bencana banjir dengan masing-masing aktor pentahelix. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama IDP selaku Bupati Luwu Utara yakni sebagai berikut :

“...*collaborative leadership* ini tentang bagaimana pimpinan mengelola gaya kepemimpinannya, dalam kasus ini untuk percepatan pemulihan pasca banjir bandang kemarin sebagai kepala daerah dan pemegang keputusan serta kebijakan yang ada di daerah, untuk mencapai tujuan bersama dalam hal penanganan bencana saya mempercayai tim/satgas yang dibentuk untuk pemulihan kebencanaan, sebagai pimpinan daerah juga memberikan motivasi kepada seluruh aspek yang terlibat pada pemulihan, menjaga komunikasi baik secara vertikal maupun horisontal, tentu juga sebagai kepala daerah ada keputusan yang harus diambil dan masing-masing itu ada resikonya, saya sebagai kepala daerah harus mampu dan berani untuk mengambil resiko pada keputusan, walaupun banyak pro dan kontra dari berbagai pihak...”
(Wawancara, Masamba 12 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan gaya kepemimpinan kepala daerah kabupaten Luwu Utara, sudah merapkan beberapa kolaborasi dengan terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak yang dianggap mampu untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang, serta untuk *collaborative leadership* sebagai kepala daerah Luwu Utara sangat terbuka dengan artian lancarnya komunikasi kepada semua pihak sehingga keterbukaan kolaborasi mudah untuk dijalankan sehingga efektivitas pemulihan tentu terus

dapat berjalan. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama JS selaku PLT kepala dinas sosial Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...dinas sosial terus mendukung kebijakan dan keputusan kepala daerah terkait dengan pemulihan pasca bencana, bekerjasama dengan kementerian sosial, dan dinas sosial provinsi. Kemudian juga tidak terlepas komunikasi pemerintah desa yang selalu ada ditengah korban dan terus melakukan kordinasi dengan semua aspek, jadi dinas sosial sangat terbuka dengan apapun bentuk kerjasama dengan petunjuk pimpinan tentunya...” (Wawancara, Masamba 15 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menunjukkan *laedership collaborative* pemerintah daerah terhadap percepatan pemulihan pasca bencana banjir sangat komunikatif dan terbuka, keterbukaan tersebut menjadi hal yang sangat efektif dan signifikan membantu proses pemulihan pasca bencana menjadi lebih cepat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama MM selaku kepala kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...sebagai kepala kepala pelaksana badan penanggulangan daerah, kepemimpinan harus tegas serta berprinsip karena bencana ini mempengaruhi semua aspek termasuk kehidupan manusia, harus mampu mengelola manajemen konflik karena bencana juga tidak hanya bencana alam, ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Dan juga sebagai pimpinan dari instansi penanggulangan bencana daerah *collaborative leadership* ini harus diterapkan baik itu kepada pimpinan, bawahan serta lembaga dan instansi yang bekerjasama dengan BPBD...” (Wawancara, Masamba 14 Juni 2023)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya sebagai kepala instansi yang menaungi badan penanggulangan bencana

daerah di Kabupaten Luwu Utara leadership collaborative sangat dibutuhkan untuk membuat manajemen konflik serta penyelesaiannya, *collaborative leadership* membutuhkan semua gaya kepemimpinan agar kinerja sebagai *leader* menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama TK pengelola sektor swasta dalam hal ini pengelola sentra bisnis masamba mengatakan :

“...tidak hanya pada pemerintahan yang memerlukan kolaborasi kepemimpinan, berada disektor swasta apa lagi kita memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak bencana kemarin juga kita harus terapkan leadership didalamnya, kenapa mereka boleh menempati tenan di sentra bisnis masamba tentu juga harus mengikuti aturan pengelola, terkait kebersihan dan kualitas produk yang dijual, kenapa? Agar citra sentra bisnis masamba yang menjadi pusat kuliner dan bisnis lainnya tetap terjaga...” (Wawancara, Masamba 17 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas bahwasanya collaborative leadership tidak hanya diterapkan oleh sektor publik/ pemerintah, namun sektor swasta yang mengelola usaha juga membutuhkan leadership tidak hanya satu gaya kepemimpinan juga ada kolaborasi kepemimpinan yang digunakan untuk mampu menjalankan usahanya hingga saat ini. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama IA selaku kordinator kkn tematik kebencanaan di luwu Utara, mengatakan bahwa :

“...kampus sekarang jamannya sudah tidak seperti dulu lagi yang mana biasanya kepemimpinan otoriter dan tradisional yang diterapkan, apa lagi sekarang kita sudah kampus merdeka belajar, proses belajar dan turun ketengah masyarakat bukan lagi hanya sekedar formalitas kelulusan, mahasiswa juga diajarkan untuk mampu memiliki jiwa kepemimpinan dan mereka diharapkan mampu melakukan kolaborasi kepemimpinan yang kemudian nanti akan dibawa

setelah lulus kuliah dan dipergunakan dengan baik pada kehidupan setelah kuliah...” (Wawancara, Masamba 5 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas bahwasannya civitas kampus menganggap kolaborasi kepemimpinan juga sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang turun melakukan kkn, dengan berbaur dengan masyarakat belajar dan beraktivitas ditengah masyarakat civitas berharap mahasiswa mampu berkolaborasi khususnya menumbuhkan leadership kepada mahasiswa berada di tengah masyarakat dan membantu masyarakat pemulihan pasca bencana banjir bandang yang terjadi di luwu utara. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama TR selaku Dosen universitas andi djemma palopo mengatakan :

“...Civitas berkolaborasi dengan pemerintah luwu utara, dengan kepemimpinan yang terbuka dari pemerintah, membangun komunikasi dengan pemerintah tentu untuk ikut berperan dan berkolaborasi pada pemulihan bencana banjir bandang...”(Wawancara, Masamba 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya pihak universitas andi djemma palopo dengan membangun komunikasi dengan pemerintah luwu utara terkait dengan percepatan pemulihan pasca bencana Selanjutnya dilakukan wawancara bersama RM selaku salah satu jurnalis dan penggiat jurnalis warga di Luwu Utara mengatakan bahwa

:

“...jurnalis itu memiliki kode etik kejournalisan, sehingga jurnalis juga harus berkualitas sehubungan dengan kolaborasi kepemimpinan, di dunia jurnalis tentu media besar membutuhkan jurnalis yang bukan kaleng-kaleng sehingga jurnalis membutuhkan kolaborasi pada kinerjanya, jurnalis yang memiliki jiwa leadership dan

diterapkan dan ada kolaborasi saya yakin mereka adalah orang yang tentu punya pengaruh, sehingga dampaknya khususnya pada percepatan pemulihan bencana sangat baik, informasi dan publikasi mereka dengan mudah ada di media nasional dan mengundang hal layak membantu dan berpartisipasi pada pemulihan pasca bencana...” (Wawancara, Masamba 16 Juni 2023)

Hasil wawancara tersebut media juga melakukan kolaborasi kepemimpinan baik itu kepada jurnalis, maupun sesama media agar kualitas media tetap terjaga dan kepercayaan publik kepada media juga tetap eksis di mata masyarakat dan semua hal layak, pada proses percepatan pemulihan pasca banjir bandang media tidak sedikit memiliki peran yang begitu besar, informasi yang disampaikan media juga menjadi salah satu tombak daerah mampu pulih lebih cepat karena akses informasi yang baik dari media. Kemudian juga dilakukan wawancara dengan masyarakat RAD mengenai pemulihan banjir bandang mengatakan :

“...tentu kami masyarakat sangat menyambut baik jika memiliki pimpinan daerah dengan kolaborasi kepemimpinan, maksudnya biasanya ada pimpinan di daerah maupun pimpinan lingkungan biasanya arogan dan bertindak semaunya saja, kalau pemimpin daerah bisa berkolaborasi dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki lebih mudah untuk masyarakat berkomunikasi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat juga saya yakin mudah ditangani dengan kemampuan kolaborasi leadership yang baik dari pimpinannya, kepala daerah kita ini saya anggap sudah melakukan hal tersebut karena beliau dengan masyarakat begitu dekat, turun melakukan komunikasi langsung mendengarkan keluhan masyarakat yang terkena dampak banjir bandang...” (Wawancara, Masamba 11 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas bahwasannya masyarakat menyambut baik pimpinan yang memiliki kepemimpinan yg kolaboratif karena pimpinan

yang mampu mengkolaborasikan leadershipnya akan mudah memahami masyarakatnya, dan pemulihan bencana banjir bandang lebih cepat dibandingkan pimpinan yang kaku gaya kepemimpinannya.

Dari indikator collaborative leadership dari seluruh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya collaborative leadership digunakan oleh seluruh aktor pentha helix, pemerintah, sektor swasta, akademik, media dan komunitas tidak lepas dengan kolaborasi kepemimpinannya masing-masing. Komunitas dalam hal ini masyarakat erat kaitannya dengan pemerintah kolaborasi leadership akan mempengaruhi masyarakat, sehingga kolaborasi kepemimpinan dengan aktor pentha helix dianggap mampu melakukan percepatan pemulihan pasca bencana banding bandang dengan efektif dan efisien.

3. *Strategic Vision*

Strategic Vision. Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar. Dengan berdasarkan indikator *Strategic Vision* tersebut dengan melakukan kerjasama dengan aktor penthahelix, peneliti melakukan wawancara bersama aktor pentha helix dan aktor-aktor yang berkaitan dengan kolaborasi pada percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandan. Adapun informan pada penelitian ini, Bupati Luwu Utara, Kepala pelaksana tugas harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Utara, Kepala Dinas sosial Kab. Luwu Utara, Pemilik sektor bisnis yakni pengelola Sentral Bisnis Masamba, kordinator KKN tematik Unhas, Ketua LPPM Universitas Andi Djemma, beberapa masyarakat, dan jurnalis dari media yang terlibat pada percepatan pemulihan dampak banjir bandang di Luwu Utara.

Berdasarkan indikator *Strategic Vision* pada kolaborasi pentha helix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, terkait mengenai visi dan strategi yang ingin dicapai pada kolaborasi pada pemulihan pasca bencana banjir dengan masing-masing aktor pentahelix. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama IDP selaku Bupati Luwu Utara yakni sebagai berikut :

“...visi pemerintah tidak lain kita ingin proses kita bangkit dari bencana banjir bandang kemarin cepat kembali seperti sedia kala, tapikan kita butuh proses yang tidak mudah, dan cukup memakan waktu yang lama, sekarang ini kita sudah 3 tahun tapi proses pemulihan kita masih terus dilakukan, infrastruktur pelan-pelan kita benahi dengan semua keterbatasan yang kita miliki, korban yang kehilangan tempat tinggal alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan kembali tempat tinggal dengan memberikan hunian, saat ini strategi pemerintah pada pemulihan pasca bencana adalah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan membentuk desa tangguh bencana baik dari segi kemampuan dan pemahaman untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi karena tidak dipungkiri daerah kita ini rawan bencana banjir, longsor, maupun gempa bumi untuk mencapai zero target pada bencana yang terjadi di daerah...”(Wawancara, Masamba 12 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui yakni visi dan strategi pemerintah, adalah mempecepat proses pemulihan dampak bencana banjir bandang yang terjadi, serta strategi pemerintah pada pemulihan

dampak bencana banjir bandang dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam, untuk mengurangi resiko bencana. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama JS selaku PLT kepala dinas sosial Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...dinas sosial sebagai media pemerintah membantu melakukan percepatan pemulihan, strategi mitigasi dan kesiapsiagaan, dinas sosial dibantu dengan kementerian sosial dan basarnas melaksanakan kegiatan kegiatan kampung siaga bencana yang dilaksanakan di beberapa kecamatan 3 tahun terakhir terus digiatkan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan masyarakat menghadapi bencana, daerah yang dianggap rawan bencana banjir, selain itu juga 49 persen desa yang ada di luwu utara sudah masuk desa tangguh bencana, strategi ini kemudian terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk percepatan pemulihan bencana banjir...” (Wawancara, Masamba 15 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas bahwasannya strategi pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat direalisasikan dengan melalui dinas sosial dan kementerian sosial RI dengan membentuk kampung siaga bencana dengan memberikan pelatihan dan pemahaman masyarakat desa untuk meperkuat mitigasi kebencanaan dengan kurangnya resiko bencana didaerah. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama MM selaku kepala kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...badan penanggulangan bencana daerah kabupaten luwu utara untuk mendukung penuh kebijakan kepala daerah, pada penguatan mitigasi bencana, BPBD menjalankan full pemantauan debit air sungai, informasi

yang terus uptodate untuk penguatan mitigasi BPBD juga menggelar simulasi bencana banjir bandang, dengan masyarakat yang paling dekat dengan daerah sungai kita adakan simulasi banjir bandang di desa balebo dengan melibatkan seluruh masyarakat agar pengetahuan masyarakat melakukan penyelamatan diri...” (Wawancara, Masamba 14 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas untuk mewujudkan visi dan strategi pemerintah terhadap mitigasi dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat peran badan penanggulangan bencana daerah selalu siap dalam mengawasi debit air sungai dan memberikan peringatan kepada masyarakat, serta melakukan simulasi banjir bandang untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana banjir bandang kedepannya. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama TK pengelola sektor swasta dalam hal ini pengelola sentra bisnis masamba mengatakan :

“...visi dan strategi kami sebagai pihak sektor swasta sebenarnya lebih ke visi kemanusiaan membantu korban dampak bencana, strategi juga tidak seperti pemerintah yang lebih ke teknis, kami hanya menawarkan bantuan dan dianggap baik alhamdulillah, kini masyarakat yang terkena dampak perlahan mulai mampu mengembalikan usaha mereka...” (Wawancara, Masamba 17 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas bahwasannya sektor swasta sentra bisnis masamba dengan visi kemanusiaan membantu masyarakat terkena dampak bencana banjir bandang. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama SI selaku kordinator kn tematik universitas Andi Djemma Palopo, mengatakan bahwa :

“..visi civitas universitas Andi Djemma, menurunkan mahasiswa kelapangan selain memberikan pembelajaran kepada mahasiswa juga bentuk

kerjasama dan komitmen universitas dengan pemerintah daerah, dengan adanya kkn tematik perhutanan, daerah limbong yang rawan akan bencana longsor dengan program mahasiswa diperhutanan semoga memberikan peran serta partisipatif dalam percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang...” (Wawancara, Masamba 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya visi univesitas Andi Djemma selain sebagai bentuk pembelajaran kampus merdeka juga bentuk dan komitmen universitas kerjasama dengan pemerintah daerah pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu utara. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama IA selaku kordinator KKN Tematik Kebencanaan Unhas mengatakan bahwa :

“Visi kami fokus pada penelitian kebencanaan dan keilmuannya, strategi yang kami gunakan dengan terjun kelapangan melihat dan meneliti melakukan mitigasi banjir kebencanaan di daerah bencana. (Wawancara, Masamba 05 Juni 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama RM selaku salah satu jurnalis di Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...media visinya untuk memberikan potret kepada masyarakat luas dan untuk memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada, dan tanggap siaga dalam menghadapi bencana. Untuk strategi media tidak banyak hanya memberikan infromasi dan mempublikasikan potret wiilayah yang terkena bencana...” (Wawancara, Masamba 16 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas bahwasannya media memiliki visi untuk memberikan keasadaran kepada masyarakat luas untuk sadar dan tanggap bencana dengan strateginya menyebakrkan informasi seluas-luasnya. Kemudian juga dilakukan wawancara dengan masyarakat MH mengenai pemulihan banjir bandang mengatakan:

“...untuk visi dan strategi masyarakat pada percepatan pemulihan bencana banjir bandang, tidak ada strategi dan visi hanya saja kami berharap kehidupan yang aman dan tenang...” (Wawancara, Masamba 11 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya masyarakat sebagai komunitas tidak memiliki visi dan strategi pada pemulihan pasca bencana banjir bandang.

Berdasarkan indikator *strategic vision* pada seluruh wawancara diatas dengan seluruh aktor pentha helix dapat disimpulkan yakni bahwasannya visi pemerintah daerah pada percepatan pemulihan pasca banjir bandang dengan melakukan penguatan mitigasi bencana yang berbasis masyarakat dengan strategi yang dilakukan memberikan pemahaman dan kemampuan kepada masyarakat mengenai kebencanaan guna untuk mengurangi resiko bencana baik itu korban jiwa dan kerusakan material. Sedangkan aktor pentha helix media dengan visi yang sama namun berbeda langkah strategi yang diambil dengan menyebarkan potret bencana pada suatu wilayah kepada masyarakat luas untuk peduli terhadap lingkungan dan lebih waspada. Aktor pentha helix di sektor pendidikan melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat turun melakukan pengabdian yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk pengabdian dan melakukan program kerja yang membantu proses percepatan pemulihan.

4. *Collaborative Team Process*

Collaborative Team Process. Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

Dengan berdasarkan indikator *collaborative leadership* tersebut dengan melakukan kerjasama dengan aktor pentahelix, peneliti melakukan wawancara bersama aktor pentahelix dan aktor-aktor yang berkaitan dengan kolaborasi pada percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandang. Adapun informan pada penelitian ini, Bupati Luwu Utara, Kepala pelaksana tugas harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kepala Dinas sosial Kab. Luwu Utara, Pemilik sektor bisnis yakni pengelola Sentral Bisnis Masamba, kordinator KKN tematik Unhas, Ketua LPPM Universitas Andi Djemma, beberapa masyarakat, dan jurnalis dari media yang terlibat pada percepatan pemulihan dampak banjir bandang di Luwu Utara.

Berdasarkan indikator *Collaborative Team Process* pada kolaborasi pentahelix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, terkait mengenai kolaborasi yang dilakukan pemerintah bersama seluruh aspek non birokrasi pada seluruh aktor pentahelix untuk melakukan kolaborasi pada pemulihan pasca

bencana banjir dengan masing-masing aktor pentahelix. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama IDP selaku Bupati Luwu Utara yakni sebagai berikut :

“...kolaborasi pada penanganan bencana sangat penting, karena kita sudah pernah mengalami bencana yang cukup besar, kolaborasi dilakukan dengan semua pihak baik birokrasi non birokrasi semua kami rangkul, dengan kondisi saat ini kita tidak boleh membiarkan masyarakat menunggu bencana datang, untuk itu kita harus menyiapkan masyarakat menghadapi potensi yang bisa terjadi, berkolaborasi dengan masyarakat, pihak TNI, Basarnas, akademisi sektor swasta aktif pentahelix semua tanpa terkecuali kita menyiapkan dan masing-masing memiliki peran dibidangnya pada proses pemulihan bencana...” (Wawancara, Masamba 12 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa collaborative team proses sangat dibutuhkan pada pemulihan pasca bencana banjir bandang, dengan melibatkan aktor pentahelix dianggap mampu berkolaborasi kembali memulihkan dampak pasca bencana, berdasarkan bidangnya masing-masing proses kolaborasi sangat membutuhkan tim kerja yang baik dan berada pada visi dan misi yang sama agar kolaborasi menjadi efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama JS selaku PLT

kepala dinas sosial Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...dalam melakukan optimalisasi percepatan pemulihan kebencanaan memang sangat diperlukan adanya tim/satgas yang bergerak, seperti pandemi covidkan kemarin ada satgas tpi mereka lebih ke birokrasi, kalau tim satgas pemulihan percepatan bencana bajir bandang saat ini itu belum ada, kita hanya melakukan kerjasama dengan semua pihak tapi tidak membuat satuan kerja, kita bekerja sama sektor

swasta, pendidikan dan sebagainya pada proses pemulihan ini...” (Wawancara, Masamba 15 Juni 2023)
 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya pemerintah bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua aktor pentha helix tanpa membuat tim satuan tugas, pemerintah secara mandiri masing-masing melakukan kerja sama dengan aktor pentha helix dan bekerja sesuai bidang masing-masing. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama MM selaku kepala kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...kolaborasi tim sangat diperlukan di badan penanggulangan bencana daerah, kita ada tim reaksi cepat tanggap terhadap situasi apapun, tentu juga bpbd melakukan kolaborasi dengan semua pihak baik sesama instansi birokrasi, ada dinas kesehatan, ada dinas perhubungan, dinas sosial dari segi sektor swasta kita ada bank sulsebar, BNI, BRI yang memberikan bantuan begitu banyak diberikan kepada pemerintah daerah, kerjasama ini kemudian sangat membantu kerja daerah dalam percepatan pemulihan daerah psdcs bencana...” (Wawancara, Masamba 14 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasannya kolaborasi tim pada badan penanggulangan daerah sangat penting, baik itu kolaborasi dengan instansi birokrasi dan non birokrasi mereka terlibat dan memberikan peran pada percepatan pemulihan pasca bencana. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama TK pengelola sektor swasta dalam hal ini pengelola sentra bisnis masamba mengatakan :

“...kami dari pihak non birokrasi melakukan kerjasama dengan instansi DP2KUKM, untuk memfasilitasi masyarakat kurang lebih 200 pemilik usaha kami berikan ruang untuk melanjutkan bisnis untuk mampu bangkit dari keterpurukan, kehilangan harta benda

pelan-pelan merintis usahanya kembali...” (Wawancara, Masamba 17 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sektor non birokrasi melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah, dalam hal ini dinas perdagangan, perindustrian, koperasi & ukm, untuk membantu percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama SI selaku kordinator kn tematik universitas Andi Djemma Palopo, mengatakan bahwa :

“...jadi kolaborasi yang kita lakukan ini bersama pemerintah daerah tidak hanya sekedar membantu melalui mahasiwa yang turun mengabdikan ke masyarakat walaupun kami bukan orang birokrasi melainkan akademisi, juga membantu pada pengembangan penelitian ada jurusan teknik yg kemudian melakukan pada sedimen-sedimen yang terbawa banjir agar pemerintah bisa memanfaatkan sedimen yang dibawa banjir kemarin seperti pasir, batu yang turun dari gunung..” (Wawancara, Masamba 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya proses kolaborasi tim yang dilakukan oleh civitas akademika universitas andi djemma tidak hanya dengan melakukan pengabdian masyarakat melainkan juga melakukan pengembangan penelitian pada sedimen-sedimen banjir untuk bisa dimanfaatkan. Dan juga dilakukan wawancara bersama AI selaku kordinator kebencanaan universitas hasanuddin mengatakan :

“...Kami dari universitas, dan non birokrasi dalam hal membantu percepatan pemulihan kebencanaan melalui pengembangan dan penelitian kebencanaan ilmu dan kajian yang dianggap mampu memperkuat mitigasi (Wawancara, Masamba 20 Juni 2023)

Dari wawancara diatas bahwasannya universitas sebagai aktor non birokrasi berperan dalam pengembangan dan penelitian

kebencanaan mengenai penguatan mitigasi bencana. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama RM selaku salah satu jurnalis di Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...media partner non birokrasi terus bersama pemerintah membantu, dan mengawal percepatan pemulihan pasca bencana banjir, media sebagai saksi pemerintah dan semua aspek yang turun ikut membantu, jurnalis-jurnalis tidak hanya fokus kepada pemberitaan publik tapi juga membuka ruang kepada masyarakat mampu menyalurkan informasi dengan cepat dan berkualitas...”(Wawancara, Masamba 16 Juni 2023)

Dari wawancara diatas bahwa media sebagai partner kolaborasi pemerintah yang non birokrasi hingga saat ini selalu bersama pemerintah berkolaborasi dan mengawal proses percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian juga dilakukan wawancara dengan masyarakat MH mengenai pemulihan banjir bandang mengatakan:

“...masyarakat tidak hanya sebagai korban dampak bencana alam, tapi masyarakat juga harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah, kita masyarakat tidak boleh hanya menunggu dibantu karena pemerintah juga pasti punya keterbatasan jadi saya sebagai masyarakat bersama pemerintah desa setempat melakukan yang bisa untuk pemulihan pasca bencana, seperti tempat didesa kami ini cukup terkena dampak yang besar bergotong royong membantu warga lain perbaikan rumah dan lain sebagainya...”(Wawancara, Masamba 11 Juni 2023)

Wawancara diatas masyarakat mitra pemerintah non birokrasi sekaligus korban dampak bencana, memiliki inisiasi tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah bergotong-royong melakukan perbaikan lingkungannya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada *Collaborative team process* dapat disimpulkan yakni proses kolaborasi pemerintah dengan seluruh aktor pentahelix non birokrasi yakni dengan mengerjakan sesuai dengan masing-masing bidangnya akademisi melakukan penelitian untuk membantu pemerintah, sektor swasta memberikan fasilitas dan ruang kepada masyarakat, media terus mengawal proses pemulihan pasca bencana banjir bandang di Luwu Utara.

5. Collaborative Structure.

Collaborative struktur adalah membenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.

Dengan berdasarkan indikator *collaborative Structure* tersebut dengan melakukan kerjasama dengan aktor pentahelix, peneliti melakukan wawancara bersama aktor pentahelix dan aktor-aktor yang berkaitan dengan kolaborasi pada percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandang. Adapun informan pada penelitian ini, Bupati Luwu Utara, Kepala pelaksana tugas harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kepala Dinas sosial Kab. Luwu Utara, Pemilik sektor bisnis yakni pengelola Sentral Bisnis

Masamba, kordinator KKN tematik Unhas, Ketua LPPM Universitas Andi Djemma, beberapa masyarakat, dan jurnalis dari media yang terlibat pada percepatan pemulihan dampak banjir bandang di Luwu Utara.

Berdasarkan indikator *Collaborative structure* pada kolaborasi pentahelix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, terkait mengenai pembehanan sistem dan sumberdaya manusia guna memastikan kolaborasi berjalan sesuai pada kolaborasi pemulihan pasca bencana banjir dengan masing-masing aktor pentahelix. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama IDP selaku Bupati Luwu Utara yakni sebagai berikut :

“..pemerintah sudah banyak melakukan recovery baik itu pada infrastruktur pelan-pelan kita recovery, fasilitas publik, jalan, rumah ibadah dan masih banyak lainnya, kemudian juga kita recovery ekonomi masyarakat dengan mengadakan revitalisasi, memulihkan kehidupan masyarakat disemua aspek, dengan itu tentu pembenahan pemerintah juga harus kuat, membenahi semua dinas yang dianggap punya peran yang sangat penting pada pemulihan, banyak upaya yang kami lakukan bekerjasama dari satu pihak dengan pihak yang lain, sistem-sistem kinerja yang tadinya mungkin hanya bekerja standar sekarang di optimalisasikan semua harus bergerak tentu juga pembenahan penguatan sistem kebencanaan terus dibenahi...” (Wawancara, Masamba 12 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui pembenahan pasca pemulihan bencana hingga saat ini terus dilakukan baik itu pembenahan infrastruktur maupun sistem pada penguatan kebencanaan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya peneliti

melakukan wawancara bersama JS selaku PLT kepala dinas sosial Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...pembenahan sistem pada semua lapisan, pembenahan kembali perekonomian masyarakat korban bencana, sarana dan prasarana, secara struktural maupun non struktural yang melibatkan masyarakat, kemudian juga saat ini dinas sosial juga membenahi fasilitas lumbung desa penguatan kebencanaan ini terus dilakukan karena pengalaman yang sudah dilalui akibat banjir bandang...”
(Wawancara, Masamba 15 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya pembenahan sistem baik secara struktur maupun non struktur terus dilakukan untuk penguatan kebencanaan dan pemulihan kebencanaan. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama MM selaku kepala kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“...di instansi BPBD kita selalu melakukan pembenahan sumberdaya manusia, kita benahi TRC yang bertugas sebagai satuan tanggap bencana, mereka selalu dilatih dan berkolaborasi dengan basarnas, peningkatan yang seperti ini yang menjadi penguatan, bukan hanya SDMnya saja, pembenahan pada bantuan dan penyaluran bantuan juga terus dibenahi oleh instansi kami...” (Wawancara, Masamba 14 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwasannya pembenahan pada badan penanggulangan daerah kabupaten Luwu Utara meningkatkan sumberdaya manusia pada satuan tanggap bencana dan terus melakukan pembenahan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang.

Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama TK pengelola sektor swasta dalam hal ini pengelola sentra bisnis masamba mengatakan :

“...pembenahan sistem terus kami lakukan pada pengelolaan usaha sentra bisnis kalau ada yang bisa kami perbuat lagi untuk membantu pelaku UMK di sentra bisnis pasti kami akan bantu sejauh ini hanya itu yang kami bisa lakukan...” (Wawancara, Masamba 17 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya sektor swasta terus melakukan penbenahan sistem untuk dapat membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di daerah sekitarnya. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama IA selaku kordinator kkn tematik kebencanaan di luwu Utara, mengatakan bahwa :

“...kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten luwu utara dibidang kebencanaan dengan terus melakukan penelitian untuk pembenahan-pembenahan, melalui program pengabdian masyarakat, kita benahi kualitas masyarakat terhadap kebencanaan, kita berikan masukan kepemerintah daerah mengenai kebencanaan dan perbaikan lingkungan tatakelola lingkungan di daerah sekitar bekas bencana...” (Wawancara, Masamba 05 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran akademisi pada pembenahan pemulihan proses pasca bencana banjir bandang ini adalah dengan memberikan penguatan kebencanaan dan memberikan masukan terhadap tatakelola lingkungan terkena dampak bencana banjir bandang.

Berdasarkan indikator Collaborative structur dari seluruh wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, seluruh aktor pentha helix melakukan pembenahan pada masing-masing bidang dan fungsinya, pemerintah berkolaborasi dengan semua aktor pentha helix

untuk pembenahan baik secara strktur dan non strktur demi percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 4.1
Peran Aktor Pentha Helix

p	Aktor Pentha Helix	Peran dalam Kolaborasi
	Government Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara	a. Pemulihan Bencana berbasis kearifan loka masyarakat. b. Kolaborasi leadership pada pengelolaan manajemen konflik pada pemulihan pasca bencana c. strategi pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat direalisasikan dengan melalui dinas sosial dan kementerian sosial RI dengan membentuk kampung siaga bencana dengan memberikan pelatihan dan pemahaman masyarakat desa untuk meperkuat mitigasi kebencanaan d. kolaborasi tim pada badan penanggulangan daerah sangat penting, baik itu kolaborasi dengan instansi birokrasi dan non birokrasi mereka terlibat dan memberikan peran pada percepatan pemulihan pasca bencana e. meningkatkan sumberdaya manusia pada satuan tanggap bencana dan terus melakukan pembenahan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang
	Dinas Sosial Kab Luwu Utara	a. Membangun kolaborasi berbasis kearifan loka bersama seluruh stakeholder instansi yang terlibat b. Kolaborasi leadership dengan seluruh stakeholder dan kementerian RI terkait dengan kordinasi pemulihan c. mewujudkan visi dan strategi pemerintah terhadap mitigasi dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat peran badan penanggulangan

		<p>bencana daerah selalu siap dalam mengawas debit air sungai dan memberikan peringatan kepada masyarakat, serta melakukan simulasi banjir bandang untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana banjir bandang kedepan</p> <p>bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua aktor pentha helix tanpa membuat tim satuan tugas, pemerintah secara mandiri masing-masing melakukan kerja sama dengan aktor pentha helix</p> <p>e.pembenahan sistem baik secara struktur maupun non struktur terus dilakukan untuk penguatan kebencanaan dan pemulihan kebencanaan</p>
ademic	Universitas Hasanuddin	<p>a. KKN Tematik Sagu, menjadikan sagu dikembangkan dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi komoditi pangan dengan kearifan lokal</p> <p>b. Kolaborasi kepemimpinan mahasiswa dengan masyarakat dan membantu proses pemulihar pasca bencana</p> <p>c. Visi mengkaji ilmu kebencanaan dengan strategi mitigasi bencana banjir</p> <p>d. berperan dalam pengembangan dan penelitian kebencanaan mengenai penguatan mitigas bencana</p> <p>e. pembenahan pemulihan proses pasca bencana banjir bandang ini adalah dengan memberikan penguatan kebencanaan dan memberikan masukan terhadap tatakelola lingkungan terkena dampak bencana banjir bandang</p>
	Universitas Andi Djemma Palopo	<p>a. pengembangan pertanian multikultur dengan kolaborasi pertanian masyarakat lokal dan adopsi pertanian di jepang</p> <p>b. kolaborasi leadership dengan membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ikut berkolaborasi pada percepatan pemulihar bencana.</p> <p>c. visi univesitas Andi Djemma selain sebagai bentuk pembelajaran kampus merdeka juga</p>

			<p>bentuk dan komitmen universitas kerjasama dengan pemerintah daerah pada pemuliharaan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu utara.</p> <p>d. civitas akademika universitas andi djemma tidak hanya dengan melakukan pengabdian masyarakat melainkan juga melakukan pengembangan penelitian pada sedimentasi sedimen banjir untuk bisa dimanfaatkan.</p>
<p>nis</p>	<p>Tigayen Mandiri (sentra bisnis masamba)</p>	<p>a. Berkolaborasi dengan pemerintah dinas DP2KUKM memberikan bantuan fasilitas kepada masyarakat lokal untuk berbisnis kuliner lokal.</p> <p>b. Kolaborasi leadership sektor swasta juga dilakukan seperti halnya pemerintah untuk komitmennya pada percepatan pemuliharaan pasca bencana banjir bandang</p> <p>c. visi kemanusiaan membantu masyarakat terkena dampak bencana banjir bandang strategi mendukung pemilik ukm kembali mandiri perekonomiannya</p> <p>d. sektor non birokrasi melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah, dalam hal ini dinas perdagangan, perindustrian, koperasi & ukm, untuk membantu percepatan pemuliharaan pasca bencana banjir bandang</p> <p>e. sektor swasta terus melakukan penbenahan sistem untuk dapat membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di daerah sekitarnya.</p>	
<p>edia</p>	<p>PT. Input Inter Media Indonesia</p>	<p>a. Jurnalis memiliki peran kolaborasi kultur dengan menjadikan masyarakat sebagai penyedia informasi dan jurnalis lokal</p> <p>b. kolaborasi kepemimpinan baik itu kepada jurnalis, maupun sesama media agar kualitas media tetap terjaga dan kepercayaan publik dalam pemberitaan pemulihan bencana banjir bandang</p> <p>c. visi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk sadar dan tanggap bencana dengan strateginya menyebarkan</p>	

		informasi seluas-luasnya
		d. kolaborasi pemerintah yang non birokras hingga saat ini selalu bersama pemerintah berkolaborasi dan mengawal proses percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara
	masyarakat.	<p>masyarakat</p> <p>a. Masyarakat adat yang selalu terlibat pada kegiatan pemulihan pasca bencana banjir bandang</p> <p>masyarakat menyambut baik pimpinan yang memiliki kepemimpinan yg kolaboratif karena pimpinan yang mampu mengkolaborasikan leadershipnya akan mudah memahami masyarakatnya</p> <p>C. masyarakat sebagai komunitas tidak memiliki visi dan strategi pada pemulihan pasca bencana banjir bandang</p> <p>d. non birokrasi sekaligus korban dampak bencana, memiliki inisiasi tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah bergotong-royong melakukan perbaikan lingkungan</p>

C. Pembahasan

1. Collaborative culture

Dari hasil penelitian collaborative culture aktor pentahelix masing-masing memiliki perannya pada percepatan pemulihan pasca bencana banjir, pemerintah sebagai center aktor mendukung penuh nilai-nilai kultural masyarakat pada proses percepatan pemulihan pasca bencana dan didukung oleh sektor swasta pada pemulihan ekonomi yang tentu tidak lepas dari kepedulian dan kearifan lokal masyarakat (Fera, 2023). Sedangkan pada penelitian (asmiddin dkk, 2022) pada kolaborasi triple helix dalam penanggulangan bencana tanah longsong

di Kabupaten Buton mengenai kordinasi aktor triple helix dalam upaya mitigasi bencana.

Jadi menurut fera yang menggunakan teori kolaborasi sebagai indikator kolaborasi kultur, budaya dan kultur digunakan dalam berkolaborasi serta mampu mempermudah proses pemulihan pasca bencana dikarenakan proses menjadi lebih mudah untuk dilakukan kolaborasi berbasis masyarakat.

2. *Collaborative Leadership*

Hasil penelitian menunjukkan collaborative leadership digunakan oleh semua aktor pentha helix yang terlibat. Pemerintah, sektor swasta, akademik, media dan komunitas dan pemulihan bencana dengan menggunakan collaborative leadership terlaksana lebih efisien pada percepatan pemulihan bencana banjir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmawati (2022) dalam penelitiannya kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu pengembangan masyarakat, kolaborasi leadership antar aktor saling mendukung dan meningkatkan komunikasi yang berkelanjutan. Sehingga menurut peneliti kolaborasi leadership dapat meningkatkan komunikasi secara lanjut, dan mampu mendukung sesama aktor menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing menjadi lebih efisien dan efektif.

3. *Strategic Vision*.

Hasil penelitian pada *strategic vision* menurut peneliti visi dan strategi pemerintah daerah pada pemulihan pasca bencana banjir

bandang memiliki kualitas yang baik dan didukung aktor lainnya seperti media, komunitas, akademik, bisnis sehingga pemerintah dalam menerapkan strateginya untuk pemulihan pasca bencana banjir dapat direalisasikan dan berkolaborasi dengan empat aktor lainnya dengan baik. Hal tersebut senada dengan (erly dkk,2021). bahwasannya dengan kolaborasi kerja model pentha helix mampu menghasilkan kemampuan manajemen manusia yang baik, koordinasi yang baik, fleksibilitas dan daya saing yang baik.

4. *Collaborative Team Process.*

Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

pada *Collaborative team process* dapat disimpulkan yakni proses kolaborasi pemerintah dengan seluruh aktor pentha helix non birokrasi yakni mampu melakukan kolaborasi sesuai dengan masing-masing bidangnya akademisi melakukan penelitian untuk membantu pemerintah, sektor swasta memberikan fasilitas dan ruang kepada masyarakat, media terus mengawal proses pemulihan pasca bencana banjir bandang di Luwu Utara.

5. *Collaborative structur*

adalah pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna

memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.

Hasil penelitian pada indikator indikator Collaborative structur dari seluruh wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, seluruh aktor pentha helix melakukan pembenahan pada masing-masing bidang dan fungsinya, pemerintah berkolaborasi dengan semua aktor pentha helix untuk pembenahan baik secara strktur dan non strktur demi percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Luwu Utara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sehubungan kolaborasi pentha helix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. indikator kolaborasi kultural, aktor pentha helix masing-masing memiliki perannya pada percepatan pemulihan pasca bencana banjir, pemerintah sebagai center aktor mendukung penuh nilai-nilai kultural masyarakat pada proses percepatan pemulihan pasca bencana dan didukung oleh sektor swasta pada pemulihan ekonomi yang tentu tidak lepas dari kepedulian dan kearifan lokal masyarakat, sehingga masyarakat adat bergandengan dengan pemerintah dalam penguatan mitigasi bencana, dan pengurangan resiko bencana
2. indikator collaborative leadership seluruh aktor pentha helix, pemerintah, sektor swasta, akademik, media dan komunitas menggunakan kepemimpinan yang kolaboratif. Komunitas dalam hal ini masyarakat erat kaitannya dengan pemerintah kolaborasi leadership akan mempengaruhi masyarakat, sehingga kolaborasi kepemimpinan dengan aktor pentha helix dianggap mampu melakukan percepatan pemulihan pasca bencana banding bandang dengan efektif dan efisien.

3. indikator *strategic vision* pada seluruh wawancara diatas dengan seluruh aktor pentha helix dapat disimpulkan yakni bahwasannya visi pemerintah daerah pada percepatan pemulihan pasca banjir bandang dengan melakukan penguatan mitigasi bencana yang berbasis masyarakat dengan strategi yang dilakukan memberikan pemahaman dan kemampuan kepada masyarakat mengenai kebencanaan guna untuk mengurangi resiko bencana
4. indikator *Collaborative team process* dapat disimpulkan yakni proses kolaborasi pemerintah dengan seluruh aktor pentha helix non birokrasi yakni dengan mampu berkolaborasi dengan bidangnya akademisi melakukan penelitian untuk membantu pemerintah, sektor swasta memberikan fasilitas dan ruang kepada masyarakat, media terus mengawal proses pemulihan pasca bencana banjir bandang di Luwu Utara.
5. Collaborative structur dari seluruh wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, seluruh aktor pentha helix melakukan pembenahan pada masing-masing bidang dan fungsinya, pemerintah berkolaborasi dengan semua aktor pentha helix untuk pembenahan baik secara strktur dan non strktur demi percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Luwu Utara.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah membuat tim satuan kerja melibatkan seluruh aktor Pentahelix pada pemulihan pasca bencana banjir bandang di Luwu Utara.
2. Diharapkan sektor swasta pada kolaborasi pemulihan pasca bencana banjir bandang terus ditambahkan dan bersinergi bersama membangkitkan kembali daerah yang terkena dampak bencana banjir bandang.
3. Diharapkan para stakeholder yang berkaitan dengan pemulihan pasca bencana lebih aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abowitz, D. A., Cohen, B. J., & Orbuch, T. L. (1991). Introduction to Sociology. *Teaching Sociology*, 19(4), 535. <https://doi.org/10.2307/1317905>
- Abdulsyani.2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ahmadi, Abu. (2004). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Aneng Yuningsih, kurniawan, asepep setiadi. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan Penduduk di Wilayah Resiko Tinggi Tanah Longsor terhadap Upaya Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana*.
- Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 104–120. <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v3i1.497>
- Bachtiar W. Mutaqin, Ikhwan Amri, B. A. (2019). Pola Kejadian Tsunami dan Perkembangan Manajemen Bencana di Indonesia setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004: Sebuah Tinjauan. *Lingkungan, Jurnal Bencana, dan Lingkungan, Departemen Geografi Geografi, Fakultas Mada, Universitas Gadjah, Vol. 11 No, 73–85*.
- Cahyono, E., Manajemen, A., & Ypk, A. (2019). *Manajemen Kebencanaan Berbasis Mahasiswa. II(2)*, 66–74.
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard. (2009) *Strategic Management: A Dynamic Perspective 2Edition*. New Jersey: Pearson Printice Hall.
- Choirul, S. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Dapu6107, 1, 7–8*.
- Dwi Narwoko J. (2004). Sosiologi Teks Pengantara dan Terapan. Jakarta: Prenada Media
- Djumara, Noorsyamsa. 2008. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI
- Khaira, N., Faisal, T. I., & Veri, N. (2019). *Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir sungai Krueng, Langsa Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia Nuswatul. 14(4)*, 596–605.
- Keban. Jeremias T. (2008) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Knsep. Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gavemedia
- Kurniadi, A. (2019). *JMB: Jurnal Manajemen Bencana. JMB: Jurnal Manajemen Bencana, 5(2), 1–12*.

<https://doi.org/10.33172/jmb.v8i1.960>

- M. Nasrullah, M. Dirhamsyah, Y. A. (2019). *Model pemantauan persediaan logistik kebencanaan dalam menghadapi bencana banjir tahunan di kabupaten aceh tamiang*. 4(3), 93–98.
- Nurul Ilma Sukardi, Dahlia Canra, Andika konoras, M. R. (2019). *Sistem Manajemen dan Distribusi Logistik Kebencanaan Studi Kasus Untuk Penanganan Bencana Gempa BUumi di Halmahera Selatan*. 05, 33–37.
- Pariami, nursalam dan. (2012). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Anak Toddlers (1-3 Tahun) Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012*. 1–5.
- Pearson, Judy C, Paul E. Nelson, Scott Titshworth, Lynn Harter. 2003. *Human Communication*, New york: The McGraw-Hill Companies.
- Pradhana, F. P. (2019). *Pengembangan Aplikasi Android Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan Pengurangan Resiko Bencana (SIMAK PRB) Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Kabupaten Blitar*. 9, 1–11.
- Pranata, Y. A., & Rusli, M. (2019). *Manajemen Bencana di Kota Manado Melalui Kegiatan Deteksi Sisa Kekuatan Material Bangunan*. 12(4), 699–702.
- Putra, A. I., & Jurusan. (2019). *Analisis Kinerja Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)*. 2(1), 105–112.
- Putranto, H. A. (2019). Peranan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kebencanaan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan. *Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(04 . 01 Januari 2019), 13–19. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/682/833>
- Rizkiyah, P., Liyushiana, L., & Herman, H. (2019). Sinergitas Pentahelix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Jurnal IPTA*, 7(2), 247. <https://doi.org/10.24843/ipta.2019.v07.i02.p15>
- Syaifullah, M. D. (2020). *Masamba Flash Floods in July 2020 , Meteorological Review*. 21(2), 73–83.
- Universitas, P., & Kuala, S. (2019). *Model pemantauan persediaan logistik kebencanaan dalam menghadapi bencana banjir tahunan di kabupaten aceh tamiang*. 4(3).

BAB I Fera Juliana Fajar

105031103920

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Aug-2023 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2144234932

File name: BAB_I_6.doc (46.5K)

Word count: 899

Character count: 5879

BAB I Fera Juliana Fajar 105031103920

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org

Internet Source

4%

2

eprints.umm.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Kookmin University

Student Paper

2%

Exclude quotes

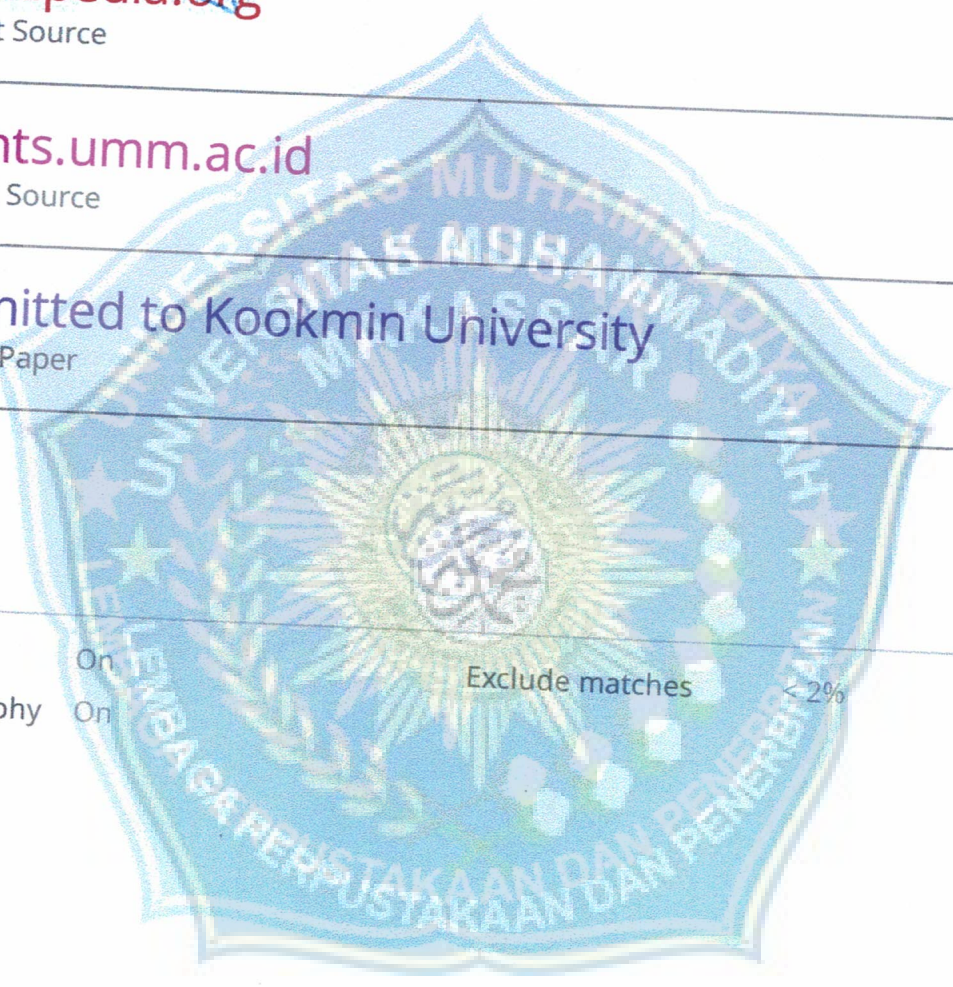
On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



BAB II Fera Juliana Fajar

105031103920

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Aug-2023 02:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146118615

File name: BAB_II_9.doc (130.5K)

Word count: 4554

Character count: 30086

BAB II Fera Juliana Fajar 105031103920

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	9%
2	bappeda.semarangkota.go.id Internet Source	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.aiska-university.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Fera Juliana Fajar

105031103920

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Aug-2023 10:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2144235852

File name: BAB_III_6.doc (52.5K)

Word count: 892

Character count: 5564

BAB III Fera Juliana Fajar 105031103920

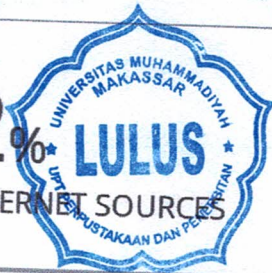
ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

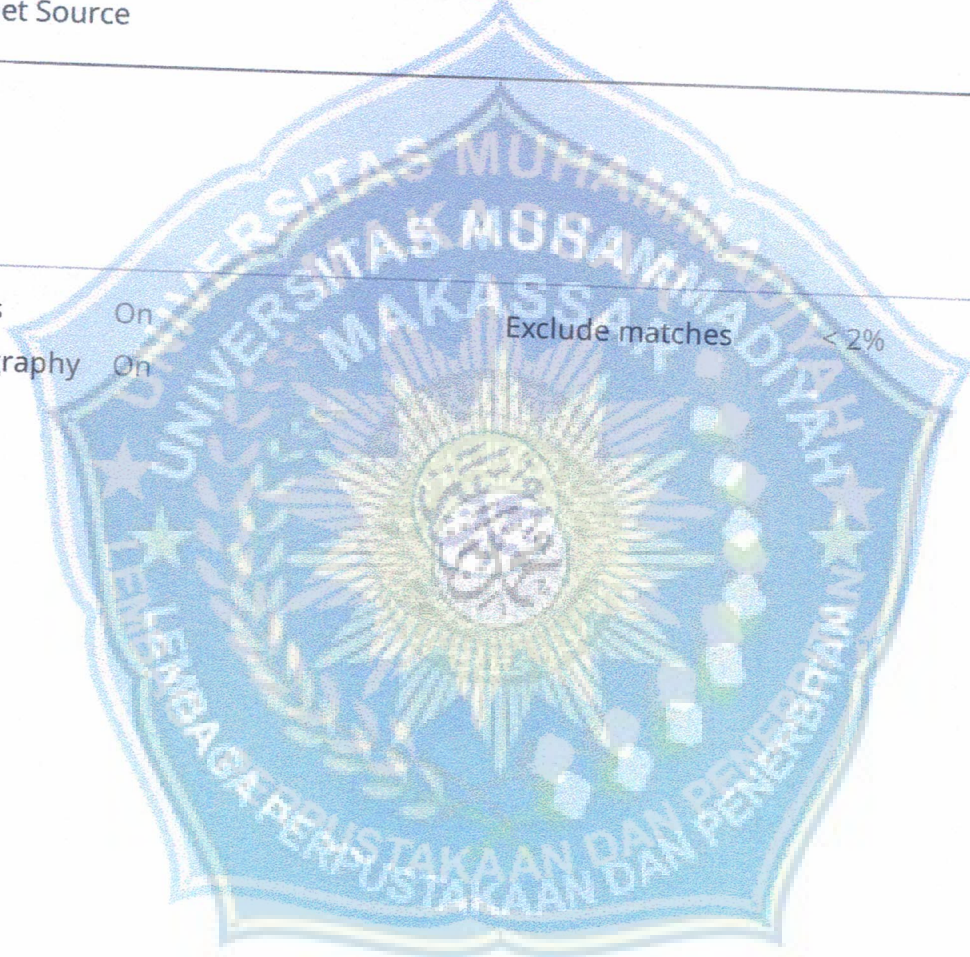
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Fera Juliana Fajar

105031103920

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Aug-2023 10:19AM (UTC+0700)
Submission ID: 2144235399
File name: BAB_IV_6.doc (172K)
Word count: 6693
Character count: 45001

BAB IV Fera Juliana Fajar 105031103920

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.umm.ac.id

Internet Source

5%

2

repository.umy.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



BAB V Fera Juliana Fajar

105031103920

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Aug-2023 10:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2144235533

File name: BAB_V_6.doc (31.5K)

Word count: 362

Character count: 2490

BAB V Fera Juliana Fajar 105031103920

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

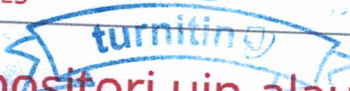
0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

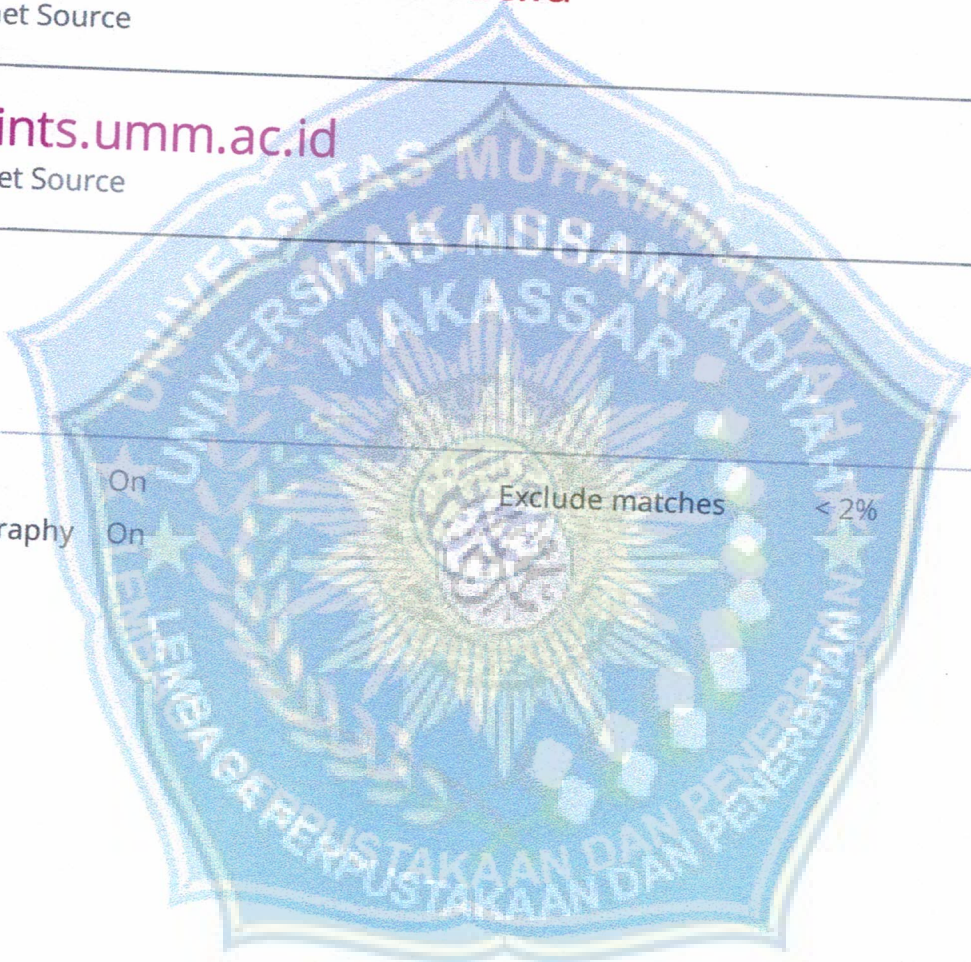
On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fera Juliana Fajar. Lahir di Makassar pada tanggal 29 Juli 1996. Lahir sebagai anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih dari pasangan Ayahanda Fajar dan Ibunda Erna. Penulis memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2002 di SDN 175 Bone-Bone Luwu Utara kemudian pindah sekolah di kelas 3 di SDN Mamajang I Makassar selama 6 tahun dan tamat tahun 2008. Dan Pada tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Makassar kemudian kelas 2 pindah ke SMP Negeri I Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2011. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi di SMA Negeri 1 Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, penulis kembali melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan S2 di Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2023 dengan judul tesis *“Kolaborasi Pentha Helix Pada Pemulihan Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara”*

